

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*)
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024



Jalan Medan Merdeka Barat No. 08
Jakarta 10110

KATA PENGANTAR

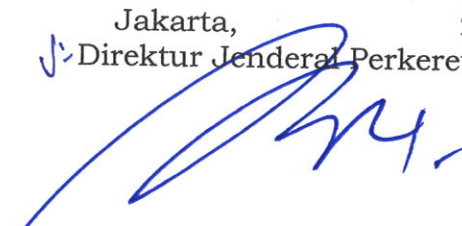
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2025
J. Direktur Jenderal Perkeretaapian


Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., M.M., IPU.
NIP 19670608 199003 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	v
I. Laporan Realisasi Anggaran	vii
II. Neraca	viii
III. Laporan Operasional	ix
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	1
A. Penjelasan Umum	1
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	15
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	45
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	53
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-600- 3838

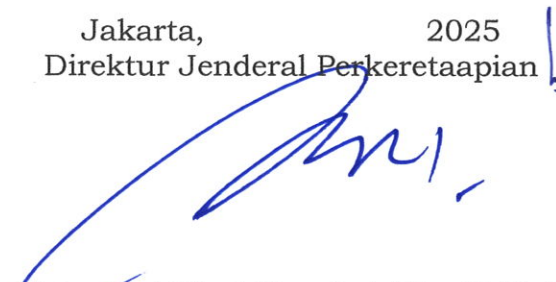
WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id/>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2025
Direktur Jenderal Perkeretaapian !


Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., M.M., IPU.
NIP 19670608 199003 1 005

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA. 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.167.640.051.960 atau mencapai 92 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.266.772.104.000.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.858.915.997.838 atau mencapai 54 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp10.752.311.067.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada TA. 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan Rp344.816.160.666.978 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.687.078.581.979; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp339.122.079.297.986; Properti Investasi (neto) sebesar Rp1.414.606.082.566; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.592.396.704.447.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp114.721.135.094.423 dan Rp230.095.025.572.555.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.664.123.073.264 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp10.839.717.724.261 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp9.175.594.650.997. Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp2.296.414.532.270 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp6.879.180.118.727.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp234.788.690.640.291 ditambah Defisit-LO sebesar Rp6.879.180.118.727 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp2.567.829.215.601 dan transaksi antar entitas senilai Rp4.753.344.266.592 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp230.095.025.572.555.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024		% thd Angg	31 Desember 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1,266,772,104,000	1,167,640,051,960	92.17	763,557,484,738
JUMLAH PENDAPATAN		1,266,772,104,000	1,167,640,051,960	92.17	763,557,484,738
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	189,147,790,000	186,188,948,422	98.44	141,936,482,873
Belanja Barang	B.4	2,880,697,829,000	2,394,880,557,984	83.14	1,718,719,325,260
Belanja Modal	B.5	7,682,465,448,000	3,277,846,491,432	42.67	4,685,435,474,695
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		10,752,311,067,000	5,858,915,997,838	54.49	6,546,091,282,828

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	269.489.257	-
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	47.016.600.556	29.071.510.471
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	C.5	5.000.000.000	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	1.435.560.146.488	-
Piutang Bukan Pajak	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)		-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.9	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.10	-	-
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.11	3.513.874.700	1.155.710.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.12	(17.569.373)	(5.778.550)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)		3.496.305.327	1.149.931.450
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.13	352.000	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.14	(1.760)	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)		350.240	-
Persediaan	C.15	1.195.735.690.111	1.299.928.012.779
Jumlah Aset Lancar		2.687.078.581.979	1.330.149.454.700
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.16	160.027.501.641.173	159.612.180.557.294
Peralatan dan Mesin	C.17	6.442.210.614.393	6.180.140.026.776
Gedung dan Bangunan	C.18	6.764.052.517.282	5.886.854.605.174
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.19	116.890.964.472.364	110.898.545.587.633
Aset Tetap Lainnya	C.20	547.630.360.492	547.630.360.492
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.21	14.556.019.661.925	18.906.539.058.274
Akumulasi Penyusutan	C.22	(78.846.942.198.451)	(72.020.801.422.792)
Aset Konsesi Jasa	C.23	116.616.230.616.249	116.941.150.373.911
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.24	(3.875.588.387.441)	(1.357.003.087.511)
Jumlah Aset Tetap		339.122.079.297.986	345.595.236.059.251
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.25	1.422.000.778.000	1.422.000.778.000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.26	(7.394.695.434)	(6.162.246.194)
Jumlah Properti Investasi		1.414.606.082.566	1.415.838.531.806
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.27	153.009.331.664	121.504.862.690
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan		355.433.740.723	313.274.774.870
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.28	1.089.108.174.466	331.219.245.833
Aset Lain-Lain	C.29	7.716.570.806	8.449.377.233
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.30	(12.871.113.212)	(13.222.360.002)
Jumlah Aset Lainnya		1.592.396.704.447	761.225.900.624
JUMLAH ASET		344.816.160.666.978	349.102.449.946.381
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.31	944.802.855.444	307.782.255.832
Uang Muka dari KPPN	C.32	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan		-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya		269.489.257	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.34	190.249.151	1.257.017.775
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		945.262.593.852	321.077.379.995
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.35	2.687.370.134.451	-
Kewajiban Konsesi Jasa	C.36	111.088.502.366.120	113.992.681.926.095
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		113.775.872.500.571	113.992.681.926.095
JUMLAH KEWAJIBAN		114.721.135.094.423	114.313.759.306.090
EKUITAS			
Ekuitas	C.37	230.095.025.572.555	234.788.690.640.291
Jumlah Ekuitas		230.095.025.572.555	234.788.690.640.291
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		344.816.160.666.978	349.102.449.946.381

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1,664,123,073,264	180,666,585,667
JUMLAH PENDAPATAN		1,664,123,073,264	180,666,585,667
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	184,186,522,984	138,903,669,345
Beban Persediaan	D.3	15,591,563,446	19,924,826,438
Beban Barang dan Jasa	D.4	822,188,647,996	916,798,345,311
Beban Pemeliharaan	D.5	1,368,488,211,286	612,280,833,816
Beban Perjalanan Dinas	D.6	153,505,402,413	152,692,679,748
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	8,295,739,805,003	9,257,700,256,563
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	17,571,133	5,778,550
JUMLAH BEBAN		10,839,717,724,261	11,098,306,389,771
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9,175,594,650,997)	(10,917,639,804,104)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset		1,429,268,556	35,170,977,127
Beban Pelepasan Aset		8,503,903,219	1,294,753,116
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2,303,669,223,153	933,249,673,699
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		180,056,220	805,788,374
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2,296,414,532,270	966,320,109,336
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(6,879,180,118,727)	(9,951,319,694,768)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(6,879,180,118,727)	(9,951,319,694,768)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1	234.788.690.640.291	238.747.955.814.382
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6.879.180.118.727)	(9.951.319.694.768)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(2.567.829.215.601)	196.896.222.720
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	(457.008.883)	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	14.574.383.458	4.996.134.704
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	(1.053.396.259.507)	166.435.404.030
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	(1.528.550.330.669)	25.464.683.986
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.753.344.266.592	5.795.158.297.957
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(4.693.665.067.736)	(3.959.265.174.091)
EKUITAS AKHIR	E.5	230.095.025.572.555	234.788.690.640.291

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dasar Hukum Direktorat Jenderal Perkeretaapian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.08 Jakarta.

Entitas dan

Rencana

Strategis

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas dan fungsi dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen dengan visi ***“Mewujudkan eksistensi sebagai regulator dan penyelenggaraan perkeretaapian multioperator guna terselenggaranya pelayanan angkutan kereta api secara massal yang menjamin keselamatan, aman, nyaman, cepat dan lancar, tertib dan teratur, efisien, terpadu dengan moda transportasi lain, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA. 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA. 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah 16 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	445572	Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkertaapian	1	-	-	-	1
2	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	1	-	-	-	1

3	4674 62	Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api Perkereta- apian	1	-	-	-	1
4	4674 78	Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	1	-	-	-	1
5	4674 84	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	1	-	-	-	1
6	4675 04	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	-	1
7	4673 85	Balai Pengujian Per- keretaapian	1	-	-	-	1
8	4675 15	Balai Teknik Perkereta- apian Kelas I Bandung	1	-	-	-	1
9	4673 21	Balai Teknik Perkereta- apian Kelas I Semarang	1	-	-	-	1
10	4673 73	Balai Perawatan Per- keretaapian	1	-	-	-	1
11	4673 37	Balai Teknik Perkereta- apian Kelas I Surabaya	1	-	-	-	1
12	4673 45	Balai Teknik Perkereta- apian Kelas I Medan	1	-	-	-	1
13	4673 52	Balai Teknik Perkereta- apian Kelas II Padang	1	-	-	-	1
14	4673 64	Balai Teknik Perkereta- apian Kelas II Palembang	1	-	-	-	1
15	4670 05	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	1	-	-	-	1
16	4670 06	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	1	-	-	-	1
Jumlah			16	-	-	-	16

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perkeretaapian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA. 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Perhubungan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria

sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut

di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi

penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester

tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset

kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi. Hak Paten Sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman TA. 2023	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 - Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
 - Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNB	-	1,266,772,104,000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	1,266,772,104,000
Belanja		
Belanja Pegawai	151,273,439,000	189,147,790,000
Belanja Barang	2,938,246,914,000	2,880,697,829,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	6,593,807,119,000	7,682,465,448,000
Jumlah Belanja	9,683,327,472,000	10,752,311,067,000

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Rupiah Murni		
Program Infrastruktur Konektivitas	2,719,738,261,000	2,766,415,140,000
Program Dukungan Manajemen	573,369,026,000	601,547,339,000
Pinjaman Luar Negeri		
Program Infrastruktur Konektivitas	3,900,000,000	36,900,000,000
PNBP		
Program Infrastruktur Konektivitas	-	5,220,150,000
Badan Layanan Umum		
Program Infrastruktur Konektivitas	74,059,247,000	77,225,560,000
SBSN		
Program Infrastruktur Konektivitas	6,312,260,938,000	7,265,002,878,000
Total Belanja	9,683,327,472,000	10,752,311,067,000

Realisasi

Pendapatan

Rp1.167.640.051
.960

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.167.640.051.960 atau mencapai 92 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.266.772.104.000. Pendapatan lingkup Direktorat

Jenderal Perkeretaapian terdiri dari Pendapatan PNBPN dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,266,772,104,000	1,167,640,051,960	92.17
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	1,266,772,104,000	1,167,640,051,960	92.17

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 52,92 persen dibandingkan Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan BLU lainnya serta pendapatan jasa transportasi komunikasi dan informatika di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	87,194,428,542	77,205,039,725	12.94
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1,492,165,100	2,179,458,220	(31.54)
Pendapatan BLU Lainnya	2,069,679,536	282,829,664	631.78
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN luran Badan Usaha	119,153,329,019	95,345,219,142	24.97
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	3,697,635,000	3,672,520,000	0.68
Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi dan Informatika	906,145,373,097	571,103,198,829	58.67
Pendapatan Jasa Lainnya	3,314,307,007	3,200,442,000	3.56
Pendapatan Denda	5,278,945,796	1,171,108,091	350.77
Pendapatan Lain-lain	39,294,188,863	9,397,669,067	318.13
Jumlah	1,167,640,051,960	763,557,484,738	52.92

1. Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi dan Informatika senilai Rp906.145.373.097 terdiri dari:

- Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ Track Access Charge sebesar Rp902.208.197.097 pada

Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api

- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya sebesar Rp3.937.176.000 terdapat pada:

- Satker Pengembangan Lalu Lintas Dan Peningkatan Angkutan Kereta Api Rp1.142.000.000 berupa Perizinan Penyelenggara Perkeretaapian Umum
- Satker Pengembangan. Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp2.795.176.000 berupa Perizinan Perpotongan Jalur dan atau Persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain

2. Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha senilai Rp119.153.329.019; (3 Akun Signifikan)

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp88.154.219.993 terdapat pada:

- Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan sebesar Rp123.630
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta sebesar Rp2.074.221.667
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang sebesar Rp69.762
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan sebesar Rp13.422.575
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang sebesar Rp124.575
- Balai Perawatan Perkeretaapian sebesar Rp78.815.088.000
- Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp7,251,169,784

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp1.429.268.556 terdapat pada:

- Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian Rp102.130.000
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan Rp6.666.666
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

- Rp10.500.000
- Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Rp877.500.000
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sebesar
Rp217.581.000
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung sebesar
Rp214.890.890
- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin senilai
Rp28.429.615.470 pada Balai Perawatan Perkeretaapian
- 3. Pendapatan Jasa Layanan Umum senilai
Rp87.194.428.542 terdiri dari:
 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
sebesar Rp87.194.428.542 terdapat pada:
 - Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
sebesar Rp23.987.155.000
 - Balai Pengujian Perkeretaapian sebesar
Rp63.207.273.542
- 4. Pendapatan Jasa Lainnya senilai Rp3.314.307.007
merupakan pendapatan dari penjualan KA Perintis terdapat
pada:
 - Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai
Rp2.463.605.007
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang senilai
Rp303.616.000
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai
Rp282.265.000
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang senilai
Rp264.821.000

Realisasi

Belanja

Rp5.858.915.997
.838

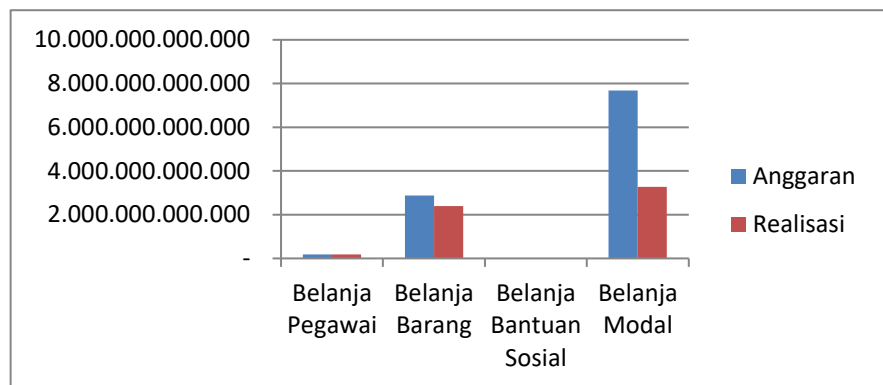
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2024 adalah sebesar
Rp5.858.915.997.838 atau 54 persen dari anggaran belanja
sebesar Rp10.752.311.067.000. Rincian anggaran dan
realisasi belanja 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2024	
	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Pegawai	186,188,948,422	186,258,708,871
Belanja Barang	2,394,880,557,984	2,394,983,384,506
Belanja Modal	3,272,655,302,951	3,282,898,975,516
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Total Belanja Kotor	5,853,724,809,357	5,864,141,068,893
Pengembalian Belanja	-	5,225,071,055
Total Belanja	5,853,724,809,357	5,858,915,997,838

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Berdasarkan Program per 31 Desember 2024

PROGRAM	31 Desember 2024	
	ANGGARAN	REALISASI
Rupiah Murni		
Program Infrastruktur Konektivitas	2,766,415,140,000	2,275,303,071,887
Program Dukungan Manajemen	601,547,339,000	552,455,980,259
Pinjaman Luar Negeri		
Program Infrastruktur Konektivitas	36,900,000,000	35,978,092,194
PNBP		
Program Infrastruktur Konektivitas	5,220,150,000	4,372,035,968
Badan Layanan Umum		
Program Infrastruktur Konektivitas	77,225,560,000	67,811,183,093
SBSN		
Program Infrastruktur Konektivitas	7,265,002,878,000	2,922,995,634,437
Total Belanja	10,752,311,067,000	5,858,915,997,838

Realisasi Belanja 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 10,50% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena menurunnya belanja modal di Direktorat Jenderal Perkeretaapian diakibatkan oleh menurunnya belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	186,188,948,422	141,936,482,873	31.18
Belanja Barang	2,394,880,557,984	1,718,719,325,260	39.34
Belanja Modal	3,277,846,491,432	4,685,435,474,695	(30.04)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	5,858,915,997,838	6,546,091,282,828	(10.50)

Belanja

Pegawai

Rp186.188.948.42

2

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp186.188.948.422 dan Rp141.936.482.873. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 31,18 persen dari 2023. Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya jumlah pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	80,727,513,568	69,926,882,680	15.45
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	10,466,324,342	664,773,456	1,474.42
Belanja Lembur	62,249,000	-	100.00
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	95,002,621,961	71,449,547,441	32.96
Jumlah Belanja Kotor	186,258,708,871	142,041,203,577	31.13
Pengembalian Belanja Pegawai	(69,760,449)	(104,720,704)	(33.38)
Jumlah Belanja	186,188,948,422	141,936,482,873	31.18

Belanja Barang

Rp2.394.880.557.9

84

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.394.880.557.984 dan Rp1.718.719.325.260.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 39,34% dari 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja pemeliharaan serta belanja perjalanan luar negeri.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	71,533,596,668	93,719,337,881	(23.67)
Belanja Barang Non Operasional	234,519,909,502	262,645,691,204	(10.71)
Belanja Barang Persediaan	16,908,923,263	20,344,752,140	(16.89)
Belanja Jasa	271,381,083,360	310,207,486,994	(12.52)
Belanja Pemeliharaan	1,357,493,535,859	592,707,299,250	129.03
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	135,907,539,198	139,408,173,838	(2.51)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2,629,479,786	1,756,451,852	49.70
Belanja Barang BLU	37,119,498,686	36,261,610,344	2.37
Kompensasi	267,489,818,184	267,489,818,184	-
Jumlah Belanja Kotor	2,394,983,384,506	1,724,540,621,687	38.88
Pengembalian Belanja	(102,826,522)	(5,821,296,427)	(98.23)
Jumlah Belanja	2,394,880,557,984	1,718,719,325,260	39.34

- Belanja Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) terdapat pada Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan sebesar Rp267.489.818.184 berupa Pembayaran Perjanjian Konsesi Penyelenggaraan Kereta Api Makassar – Pare-Pare
- Belanja Barang BLU sebesar Rp37.119.498.686 berupa (3 Akun Signifikan):
 - Belanja Barang sebesar Rp6.605.870.492 terdapat pada:
 - Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

sebesar Rp3.378.633.514

➤ Balai Pengujian Perkeretaapian sebesar
Rp3.227.236.978

- Belanja Perjalanan sebesar Rp15.007.860.197 terdapat
pada:

➤ Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
senilai Rp3.393.494.081

➤ Balai Pengujian Perkeretaapian senilai
Rp11.614.366.116

- Belanja Jasa sebesar Rp7.873.953.226 terdapat pada:

➤ Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
sebesar Rp4.257.183.878

➤ Balai Pengujian Perkeretaapian sebesar
Rp3.616.769.348

Belanja Modal

Rp3.277.846.491.432

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.277.846.491.432 dan Rp4.685.435.474.695. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 30,04% dibandingkan tahun 2023 disebabkan oleh menurunnya belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	89,048,765,933	451,689,953,769	(80.29)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	467,917,337,861	280,842,418,745	66.61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31,441,636,065	39,550,247,115	(20.50)
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	2,520,921,492,062	3,731,489,028,668	(32.44)
Belanja Modal Lainnya	142,878,059,188	152,091,476,073	(6.06)
Belanja Modal BLU	30,691,684,407	30,537,428,398	0.51
Jumlah Belanja Kotor	3,282,898,975,516	4,686,200,552,768	(29.95)
Pengembalian	(5,052,484,084)	(765,078,073)	560.39
Jumlah Belanja	3,277,846,491,432	4,685,435,474,695	(30.04)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp89.027.309.933 dan Rp451.685.903.769. Realisasi 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 80,29 persen dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena menurunnya belanja modal pembebasan tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	11,948,674,275	39,869,529,058	(70.03)
Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	50,278,884,140.00	(100.00)
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	1,344,901,968	2,829,851,510.00	(52.47)
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	-	597,520,350.00	(100.00)
Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang dilakukan oleh LMAN	75,755,189,690.00	358,114,168,711	(78.85)
Jumlah Belanja Kotor	89,048,765,933	451,689,953,769	(80.29)
Pengembalian Belanja Modal	(21,456,000)	(4,050,000)	429.78
Jumlah Belanja	89,027,309,933	451,685,903,769	(80.29)

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per 30 September 2024 adalah sebesar Rp467.917.337.861 mengalami kenaikan sebesar 66,61 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp280.842.418.745. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengadaan peralatan dan mesin sebagai pendukung kegiatan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	467,917,337,861	280,842,418,745	66.61
Jumlah Belanja Kotor	467,917,337,861	280,842,418,745	66.61
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	467,917,337,861	280,842,418,745	66.61

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp31.441.636.065 mengalami penurunan sebesar 20,50 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp39.550.247.115. Hal ini disebabkan oleh menurunnya belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31,441,636,065	39,550,247,115	(20.50)
Jumlah Belanja Kotor	31,441,636,065	39,550,247,115	(20.50)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	31,441,636,065	39,550,247,115	(20.50)

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.515.890.463.978 dan Rp3.730.728.000.595. Realisasi 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 32,56 persen dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena menurunnya belanja modal jalan dan jembatan.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2,138,742,181,815	3,385,232,274,761	(36.82)
Belanja Modal Jaringan	382,179,310,247	346,256,753,907	10.37
Jumlah Belanja Kotor	2,520,921,492,062	3,731,489,028,668	(32.44)
Pengembalian Belanja Modal	(5,031,028,084)	(761,028,073)	561.08
Jumlah Belanja	2,515,890,463,978	3,730,728,000,595	(32.56)

- Belanja Modal Jalan dan Jembatan (3 nilai paling signifikan)
 - BTP Kelas I Jakarta senilai Rp424.090.119.998
 - BTP Kelas II Palembang senilai Rp338.889.923.659
 - BTP Kelas I Semarang senilai Rp449.342.895.667
- Belanja Modal Jaringan
 - BTP Kelas I Jakarta Rp293.855.963.591
 - BTP Kelas I Surabaya Rp65.816.078.000
 - BTP Kelas I Semarang Rp22.507.268.656

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp142.878.059.188 dan Rp152.091.476.073. Realisasi 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 6,06 persen dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan menurunnya belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	142,878,059,188	152,091,476,073	(6.06)
Jumlah Belanja Kotor	142,878,059,188	152,091,476,073	(6.06)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	142,878,059,188	152,091,476,073	(6.06)

Penjelasan lebih rinci mengenai belanja modal lainnya disajikan dalam lampiran.

B.5.6 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.691.684.407 dan Rp30.537.428.398.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	29,860,573,900	29,747,380,100	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	128,661,881	0	100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	702,448,626	790,048,298.00	(0.11)
Jumlah Belanja Kotor	30,691,684,407	30,537,428,398	0.01
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	30,691,684,407	30,537,428,398	0.01

Belanja

B.6 Belanja Bantuan Sosial

*Bantuan Sosial
Rp 0,-*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rekening Bank	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp269.489.257

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp269.489.257 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Kas lainnya dan setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas juga terjadi apabila terdapat tagihan pihak ketiga yang sudah terbit SP2D namun belum dibayarkan oleh Bendahara sampai dengan periode laporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	-
Pajak PPh yang belum disetor	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	269,489,257	-
Kas Lainnya di BLU	-	-
Jumlah	269,489,257	-

Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp269.489.257 terdapat pada:

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang senilai Rp36.747.023
- Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp232.742.234

Kas pada
Badan
Layanan
Umum
Rp47.016.600.
556

C.4 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp47.016.600.556 dan Rp29.071.510.471. Kas pada Badan Layanan Umum merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Perbandingan Rincian Kas pada Badan Layanan 31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	47,016,600,556	29,071,510,471
Jumlah	47,016,600,556	29,071,510,471

Kenaikan atas Kas pada BLU disebabkan oleh ditetapkannya Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 392/KMK.05/2022 tanggal 23 September 2022.

Rincian Kas pada Badan Layanan Umum 30 September 2024

Balai	Nama Rekening	Bank	No. Rekening	Jumlah
LRT Sumsel	RPL 014 BLU BPKAR SS UTK OPS PENERIMAAN	BRI	034201001904304	9,604,150,330
Balai Pengujian	RPL 171 BLU BP-UJI UTK OPS PENERIMAAN	BRI	1528520058	37,412,450,226
Total				47,016,600,556

Kas pada Badan Layanan Umum senilai Rp52.016.600.556 terdiri dari:

Akun	LRT Sumsel	Balai Pengujian	Jumlah
Kas dan Bank - BLU	9,604,150,330	32,412,450,226	42,016,600,556
Setara kas Lainnya - BLU	-	5,000,000,000	5,000,000,000
Total			47,016,600,556

*Investasi
Jangka Pendek
- BLU
Rp5.000.000.000.000*

C.5 Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5.000.000.000 dan Rp0.

Investasi Jangka Pendek Satker BLU ini berjangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan dengan sifat deposito diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*). Rincian Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Investasi Jangka Pendek - BLU per 31 Desember 2024 dan 2023

JENIS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
LRT Sumsel	5.000.000.000	-
Balai Pengujian	-	-
Jumlah	5.000.000.000	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp1.435.560.146.488

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.435.560.146.488 dan Rp0. Merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2024 dan 2023

JENIS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.435.560.146.488	-
Jumlah	1.435.560.146.488	-

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.7 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNBPN 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang PNBPN	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang bukan pajak

pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Bukan Pajak
31 Desember 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 0,-*

**C.9 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024
dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR
yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh
tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2024
dan 2023*

No	Nama	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar
TPA Rp 0,-*

C.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran
(TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing
adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Bagian Lancar TPA
merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal
neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.11 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

*Piutang dari
Kegiatan*

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan
pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah

Operasional BLU Rp3.513.874.700 diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.513.874.700 dan Rp1.155.710.000. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut:

JENIS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	3,513,874,700	1,155,710,000
Jumlah	3,513,874,700	1,155,710,000

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Kegiatan Operasional BLU Rp17.569.373 **C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU**

- Penyisihan piutang tak tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.569.373 dan Rp5.778.550.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU 31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU			
Lancar	3,513,874,700	0.50%	17,569,373.5
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	3,513,874,700		17,569,373.5
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	3,513,874,700		17,569,373.5

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Rp352.000 **C.13 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU**
Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo

Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp352.000 dan Rp0. Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut:

JENIS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	352,000	-
Jumlah	352,000	-

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang dari
Kegiatan Non
Operasional
BLU Rp1.760*

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Penyisihan piutang tak tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.760 dan Rp0,-.

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU 31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak dari Kegiatan Non Operasional BLU			
Lancar	352,000	0.50%	1,760
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	352,000		1,760
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	352,000		1,760

*Persediaan
Rp1.195.735.690
.111*

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.195.735.690.111 dan Rp1.299.928.012.779.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan 31 Desember 2024 dan 2023

JENIS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	3,011,482,033	1,561,782,789
Suku Cadang	1,192,453,272,078	1,294,908,671,890
Persediaan Lainnya	270,936,000	3,457,558,100
Jumlah	1,195,735,690,111	1,299,928,012,779

Suku cadang pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa rel, bantalan beton dan wesel. Suku Cadang dimaksud dipergunakan untuk penunjang kegiatan perkantoran dan pembangunan Infrastruktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Bahan baku berupa tiang beton. Adapun Balai/Satker yang memiliki Persediaan Suku Cadang adalah sebagai berikut:

No	Balai/Satker	Jumlah (Rp)
1	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	265,819,611,020
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	21,474,226,990
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	47,906,886,819
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	302,561,437,560
5	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	94,614,386,073
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	11,459,004,664
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	17,893,543,137
8	Balai Perawatan Perkeretaapian	9,551,281,941
9	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	790,008,500
10	Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	420,382,885,374

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian atas Persediaan disajikan dalam lampiran.

Tanah

Rp160.027.501.6

41.173

C.16 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perkeretaapian per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp160.027.501.641.173 dan Rp159.612.180.557.294. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp 159.612.180.557.294
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	Rp 753.203.717.546
Pembelian	Rp 76.420.284.690
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 186.724.049.124
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp 715.255.574
Perolehan Lainnya	Rp 43.131.974.843
Reklasifikasi Masuk	Rp 95.147.532.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 140.822.352.014
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	Rp (95.147.532.000)
Koreksi Pencatatan	Rp (143.296.777.741)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp (642.399.772.171)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 160.027.501.641.173

- Mutasi tambah senilai Rp1.296.165.165.791 terdiri dari:
 - ❖ Koreksi Saldo Awal senilai Rp753.203.717.546 terdapat pada:
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp33.304.903.000 berupa tanah LMAN
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp69.166.920.137,- berupa pengadaan tanah LMAN Tahun 2023 sebanyak 180 NUP Tanah untuk Jalan KA/Lori dan Tanah untuk Bangunan KA
 - Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai Rp650.731.894.409 berupa pencatatan kembali aset Tanah untuk Jalan Kereta Api/Lori setelah dilakukan koreksi pencatatan untuk identifikasi aset Tanah sesuai dengan calon bidang sertifikat tanah berdasarkan peta bidang pengadaan tanah
 - ❖ Pembelian senilai Rp76.420.284.690 terdapat pada:
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp29.040.255.261 berupa biaya panjar Konsinyasi Tanah Frontage Road Segmen II Lintas BTK serta Pengadaan tanah PSN oleh LMAN Semester 1 2024
 - Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp83.620.000 berupa Tanah untuk Jalan Kereta Api/Lori masing – masing senilai Rp70.600.000 untuk honorarium Pengadaan Tanah

MRT East-West Line Project Phase 1 Stage 1 dan Rp13.020.000 merupakan Paket Meeting Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp12.801.203.116 berupa Tanah untuk Jalan Kereta Api/Lori NUP 391 seluas 1.157 m² merupakan Pengadaan tanah LMAN di Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
- Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai Rp10.759.096.313 berupa Pengadaan tanah PSN oleh LMAN Semester 1 2024 Maros
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp485.000.000 berupa Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori NUP 3961 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Patok Kepemilikan Lahan Dalam Rangka Pengamanan BMN
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp23.251.110.000 berupa Tanah untuk Jalan Kereta Api/Lori NUP 3499 berupa pengadaan Tanah LMAN Jombang-Wonokromo
- ❖ Reklasifikasi Masuk senilai Rp95.147.532.000 terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung berupa Tanah Bangunan Stasiun Kereta Api yang dilakukan reklasifikasi untuk penyesuaian kode barang, merupakan reklasifikasi masuk dari jalan kereta api lainnya menjadi Tanah Bangunan Stasiun Kereta Api NUP 1
- ❖ Pengembangan Nilai Aset (Langsung) senilai Rp715.255.574 terdapat pada Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian berupa:
 - Tanah untuk Jalan Kereta Api/Lori NUP 296 merupakan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) MRT East-West Line Project Phase 1 Stage 1 berupa biaya meeting dan sosialisasi.
 - Tanah untuk Jalan Kereta Api/Lori NUP 297 merupakan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung

(BOBP)Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana
LRT Jabodebek berupa biaya meeting dan sosialisasi

❖ Perolehan Lainnya senilai Rp43.131.974.843 terdapat pada:

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp14.188.194.582 berupa Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori seluas 1.257 m² yang merupakan pemecahan aset tanah pengadaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) NUP 390 dan 391 dengan lokasi Baros, Cimahi Tengah
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp28.943.780.261 berupa Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori seluas 9.911 m²

❖ Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp186.724.049.124,- terdapat pada:

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang senilai Rp11.890.699.000 berupa Tanah untuk Kantor Satuan Pelayanan Pekalongan yang berasal dari pendefinitifan dari KDP Tanah Dalam Pengerjaan menjadi aset Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp784.062.320 berupa Tanah Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap Tanah untuk Jalan Kereta Api/Lori
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp174.049.287.804 berupa Tanah Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap Tanah untuk Jalan Kereta Api/Lori

❖ Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp140.822.352.014 terdapat pada:

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp486.377.420 berupa:
 - Kesalahan koreksi NUP 2985 Tanah untuk Jalan Kereta Api/Lori, dimana nilai barang setelah penilaian oleh KPKNL Nomor LAP-0089/1/PRO-01.KNL.070/01.01.00/2023 tanggal 27 Juli 2023 seharusnya senilai Rp123.908.000, namun terkoreksi menjadi Rp12.390.900 sehingga koreksi nilai

- bertambah senilai Rp111.517.100
- Kapitalisasi Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori NUP 1853 2674 ke NUP 2674, 2708, 2712, 2767, 2789 dan 2790 senilai Rp. 374.860.320,- yang berasal dari biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah (BOBP)
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp16.307.032.414 berupa Kapitalisasi dari KDP Tanah Stasiun Helvetia ke 8 NUP Tanah Stasiun Helvetia, Kapitalisasi Tambahan Uang Penitipan Ganti Rugi Tanah Sts Sunggal serta Kapitalisasi dari KDP Tanah
 - Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai Rp124.028.942.180 berupa Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori untuk identifikasi aset sesuai dengan calon bidang sertifikat tanah berdasarkan peta bidang pengadaan tanah
 - Mutasi Kurang senilai Rp880.844.081.912 terdiri dari:
 - ❖ Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp642.399.772.171 terdapat pada
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp21.456.000 merupakan Tanah Bangunan Stasiun Kereta Api sebanyak 18 NUP berupa pengembalian belanja modal (uang panjar)
 - Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai Rp627.071.090.589 berupa Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori untuk identifikasi aset Tanah sesuai dengan calon bidang sertifikat tanah berdasarkan peta bidang pengadaan tanah
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung sebesar Rp14.188.194.582 berupa Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori NUP 390 dan 391 yang berlokasi di Baros Cimahi Tengah
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya sebesar Rp1.119.031.000 berupa Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori NUP 3427 yang dikurangkan untuk dicatat

kembali sebagai Bangunan Gedung Arsip Lainnya NUP 1 berupa gedung arsip di Sumobito

- ❖ Reklasifikasi Keluar senilai Rp95.147.532.000 terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung berupa Tanah Bangunan Stasiun Kereta Api yang dilakukan reklasifikasi untuk penyesuaian kode barang, tanah bangunan stasiun KA NUP 1 direklasifikasi menjadi bangunan gedung kantor permanen (pencatatan Stasiun Paledang)
- ❖ Koreksi Pencatatan senilai Rp143.296.777.741 terdapat pada:
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp33.304.903.000 berupa koreksi pencatatan karena pemecahan tanah LMAN tahun 2022 dan 2023 Tanah untuk Jalan Kereta Api/Lori NUP 3447-3450
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp109.617.014.421 berupa Tanah Untuk Jalan KA/Lori serta Tanah Bangunan Stasiun KA
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp374.860.320 berupa Tanah Untuk Jalan KA/Lori

Peralatan dan

Mesin

*Rp6.442.210.614
.393*

C.17 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.442.210.614.393 dan Rp6.180.140.026.776. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2023	Rp 6.180.140.026.776
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp 70.481.210.646
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 4.145.444.005
Transfer Masuk	Rp 132.807.537.981
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp 549.006.323.740
Koreksi Manual	Rp 202.833.060
Reklasifikasi Masuk	Rp 40.852.295.000
Perolehan Lainnya	Rp 172.368.588.217
Saldo Awal	Rp 37.475.915.997
Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	Rp 15.929.615
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp (5.898.721.660)
Transfer Keluar	Rp (131.814.528.277)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	Rp (546.094.372.000)
Reklasifikasi Keluar	Rp (40.302.295.000)
Koreksi Pencatatan	Rp (14.766.836.955)
Koreksi Manual	Rp (186.053.042)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp (6.222.683.710)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 6.442.210.614.393
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2024	Rp (5.591.720.330.841)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp 850.490.283.552

- Mutasi tambah senilai Rp1.007.356.078.261 terdiri dari :
 - ❖ Koreksi saldo awal senilai Rp37.475.915.997 terdapat pada:
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp20.906.428.768 berupa koreksi pencatatan nilai berkurang dari Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 392 menjadi 3 buah Track Motor Car NUP 2,3, dan 4 berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Seksi sarana dan Keselamatan Perkeretaapian Nomor ND/K4/319/BTP-JKT/2024 serta pemecahan kontrak paket B
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp195.927.000 berupa Alat Pengaman/Sinyal NUP 28 yang merupakan aset definitif dari no kontrak 012/SPK-LS/PPFK.KA/V/2019
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang senilai Rp1.157.912.500 berupa genset NUP 1 yang terpasang di Kereta Api Lembah Anai
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai

Rp15.215.647.729 berupa:

- Alat Pengaman/Sinyal NUP 5 berupa pekerjaan Pintu Perlindungan Lintas Serdang bedagai (PPSB) JPL 24 koreksi dari Jalan KA Bantalan Beton NUP 432
- Alat Pengaman/Sinyal NUP 6 berupa pekerjaan Pintu Perlindungan Lintas Serdang bedagai (PPSB) JPL 35 koreksi dari Jalan KA Bantalan Beton NUP 432
- Escalator NUP 1 berupa Escalator di Gedung Stasiun Medan Atas (Gedung Seberang Centre Point Jl. Jawa) merupakan koreksi pecahan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 Stasiun Medan Atas.
- Escalator NUP 2 berupa Escalator di Gedung Stasiun Medan Atas (Keberangkatan Peron 2 Atas) merupakan koreksi pecahan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 Stasiun Medan Atas.
- Escalator NUP 3 berupa Escalator di Gedung Stasiun Medan Atas (Kedatangan Peron 2 Atas) merupakan koreksi pecahan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 Stasiun Medan Atas.
- Escalator NUP 4 berupa Escalator di Gedung Stasiun Medan Atas (Keberangkatan Peron 1 Atas) merupakan koreksi pecahan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 Stasiun Medan Atas.
- Escalator NUP 5 berupa Escalator di Gedung Stasiun Medan Atas (Kedatangan Peron 1 Atas) merupakan koreksi pecahan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 Stasiun Medan Atas.
- Elevator NUP 1 berupa Elevator/Lift di Gedung Stasiun Medan Atas (Peron 2 Bawah) merupakan koreksi pecahan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 Stasiun Medan Atas.
- Elevator NUP 2 berupa Elevator/Lift di Gedung Stasiun Medan Atas (Peron 2 Bawah) merupakan koreksi pecahan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 Stasiun Medan Atas.

- Elevator NUP 3 berupa Elevator/Lift di Gedung Stasiun Medan Atas (Keberangkatan Peron 2 Atas) merupakan koreksi pecahan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 Stasiun Medan Atas.
- Elevator NUP 4 berupa Elevator/Lift di Gedung Stasiun Medan Atas (Kedatangan Peron 2 Atas) merupakan koreksi pecahan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 Stasiun Medan Atas.
- Elevator NUP 5 berupa Elevator/Lift di di Gedung Stasiun Medan Atas (Gedung Seberang Centre Point Jl. Jawa) merupakan koreksi pecahan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 Stasiun Medan Atas.
- Genset NUP 5 yaitu Genset di Gedung Stasiun Medan Atas merupakan koreksi pecahan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 Stasiun Medan Atas.
- Genset NUP 6 yaitu Genset di Gedung Stasiun Medan Atas merupakan koreksi pecahan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 Stasiun Medan Atas

❖ Pembelian Senilai Rp70.481.210.646 terdapat pada:

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp2.217.040.641
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp1.620.330.500
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp1.799.275.000
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang senilai Rp5.974.984.800
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp2.037.680.147
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang senilai Rp1.325.551.649
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang senilai Rp705.191.870
- Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai

Rp44.797.000

- Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api senilai Rp1.694.620.000
 - Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian senilai Rp875.074.995
 - Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian senilai Rp2.513.420.000
 - Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian senilai Rp8.916.514.200
 - Balai Pengujian Perkeretaapian senilai Rp27.143.699.600
 - Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp1.384.463.581
 - Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan senilai Rp9.514.936.800
 - Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai Rp2.310.629.863 berupa mini bus, sepeda motor listrik, camera conference, komputer unit lainnya, scanner, printer, mini komputer, TV, AC, meja, kursi, dll
- ❖ Transfer Masuk sebesar Rp132.807.537.981 terdapat pada:
- Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp111.195.034.718 merupakan transfer dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta berupa peralatan dan mesin di Depo Depok
 - Balai Pengujian Perkeretaapian senilai Rp7.900.603.608 berupa transfer dari Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian
 - Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian sebesar Rp1.824.510.000 berupa Gerbong Barang Terbuka sebanyak 1 unit dari Balai Perawatan Perkeretaapian serta laptop, printer dan P.C unit dari Satuan Kerja Kantor Pusat DJKA
 - Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian senilai Rp1.215.290.000 berupa Lap Top, P.C Unit dan Printer dari Satuan Kerja

Kantor Pusat DJKA dan Station Wagon

- Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api senilai Rp846.220.000 berupa Lap Top dari Satuan Kerja Kantor Pusat DJKA
- Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp940.920.000 berupa Lap Top dan Printer dari Satuan Kerja Kantor Pusat DJKA
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp993.009.704 berupa peralatan dan mesin di stasiun pondok rajeg dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp7.891.949.951 berupa peralatan dan mesin dari Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian
- ❖ Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp4.145.444.005 terdapat pada
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp14.973.235 berupa penambahan nilai penambahan nilai instalasi dan lisensi software ke Komputer Unit Lainnya
 - Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian senilai Rp10.000.000 berupa penambahan nilai RAM ke PC unit sebanyak 25 NUP dan penambahan nilai Gerbong Barang Terbuka NUP 104
 - Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan senilai Rp2.716.235.000 berupa koreksi bertambah karena penambahan sparepart
 - Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp968.634.030 berupa penambahan nilai supervisi dari pekerjaan fisiknya
- ❖ Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp549.006.323.740 terdapat pada:
 - Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan

Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp548.570.722.000 berupa alat angkutan kereta rel lainnya, kendaraan dinas bermotor perorangan, serta mini bus

- Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian senilai Rp435.601.740 berupa gerbong barang terbuka sebanyak 1 unit

❖ Reklasifikasi Masuk sebesar Rp40.852.295.000 terdapat pada

- Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp40.235.000.000 berupa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor Lainnya NUP 5 dan 6 menjadi Alat Angkutan Kereta Rel Lainnya NUP 1 dan 2
- Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian senilai Rp550.000.000 berupa Lemari Display sebanyak 20 unit reklasifikasi masuk dari Video karena salah pencatatan
- Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian senilai Rp12.595.000 berupa Filing Cabinet Besi 4 buah senilai Rp7.900.000 dan Lemari Besi/Metal 4 buah senilai Rp4.695.000 reklasifikasi masuk dari Lemari Besi/Metal 4 buah senilai Rp7.900.000 dan Filing Cabinet Besi 4 buah senilai Rp4.695.000
- Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai Rp54.700.000 berupa kursi besi/metal 3 buah, filling cabinet kayu 5 buah dan meja ruang tamu 10 buah reklasifikasi masuk dari kursi katu 3 buah, filling cabinet besi 5 buah dan meja rapat 10 buah

❖ Perolehan Lainnya sebesar Rp172.368.588.217 terdapat di

- Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp1.536.300.000 berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebanyak 4 unit merupakan

- pemecahan kontrak Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp94.997.142.499 berupa Pemecahan aset Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar) NUP 1 pada stasiun paledang serta Pemecahan aset Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 35 Gedung Bangunan Stasiun Paledang
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp6.000.000 berupa External/ Portable Hardisk sebanyak 4 buah
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp579.670.500 berupa Filing Cabinet Besi, Brandkas, Meubelair Lainnya, Kursi Dorong, Printer, Note Book serta Meja Kerja Kayu
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang senilai Rp759.000.000 berupa Forklift NUP 4 dari Koreksi Nilai Berkurang Aset karena dalam 1 NUP terdapat 2 Forklift
 - Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan senilai Rp146.459.666 berupa bak aquarium, televisi, meubelair lainnya, meja rapat serta meja komputer
 - Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp74.344.015.552 berupa
- ❖ Perolehan Reklasifikasi dari Ekstra ke Intra senilai Rp15,929,615 terdapat pada Balai Perawatan Perkeretaapian Pekerjaan Gedung Fasilitas Perawatan Prasarana dan Pekerjaan Gudang Sparepart Bekas Balai Perawatan Perkeretaapian (MYC 2023-2024) serta Pekerjaan Gedung Fasilitas Perawatan Sarana (MYC 2023-2024)
 - ❖ Koreksi Manual senilai Rp202.833.060 terdapat pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan berupa koreksi pada nilai Elevator /Lift dan Escalator
- Mutasi Kurang senilai Rp745.285.490.644 terdiri dari :
 - ❖ Transfer Keluar senilai Rp131.814.528.277 terdapat pada:
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai

Rp111.195.034.718 berupa transfer ke Balai Perawatan Perkeretaapian berupa peralatan dan mesin di Depo Depok

- Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian senilai Rp7.900.603.608 berupa transfer peralatan dan mesin ke Balai Pengujian Perkeretaapian
 - Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp722.760.000 berupa Gerbong Barang Terbuka sebanyak 1 unit ke Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian
 - Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian senilai Rp4.104.180.000 berupa pembagian pc, lap top serta printer ke direktorat
 - Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian senilai Rp7.891.949.951 berupa peralatan dan mesin yang ditransfer ke Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya
- ❖ Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp6.222.683.710 terdapat pada:
- Satuan Kerja Pengembangan Dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian senilai Rp82.435.200 berupa Lemari Besi/Metal sebanyak 14 buah yang akan dihapuskan melalui penjualan/lelang
 - Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api senilai Rp117.159.285 berupa Kursi Besi/Metal, Alat Penghancur Kertas, Rak Besi, serta Genset
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp106.501.643 berupa Scanner (Peralatan Personal Komputer), Facsimile, P.C Unit
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp123.752.122 berupa Unit Power Supply, Filing Cabinet Besi, Printer (Peralatan Personal Komputer), Kursi Dorong, Meja Komputer, Kursi Besi/Metal, Router, Meja Rapat, Layar Proyektor, Air Conditioning (AC),

Personal Computer, Computer Compatible, Kipas Angin, Switching Matrix and Server

- Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian senilai Rp3.052.341.250 berupa printer, laptop dan workstation
- Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp1.129.730.750 berupa White Board, Facsimile, Kamera Digital, Brandkas, Meja Kerja Kayu, Station Wagon
- Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian senilai Rp463.573.460 berupa Mobil Patroli dan Sepeda Motor
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp1.147.190.000 berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
- ❖ Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp5.898.721.660 terdapat pada
 - Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp1.563.300.000 berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dan lemari besi/metal
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp39.678.473 berupa Alat Pengaman / Sinyal
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang senilai Rp759.000.000 berupa Forklift NUP 1 yang dilakukan akibat kesalahan pencatatan 2 unit forklift dalam 1 NUP
 - Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp2 berupa A.C. Split NUP 46 karena kesalahan perhitungan dan pencatatan saat pemecahan kontrak
 - Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan senilai Rp3.563.743.185 berupa meja rapat, elevator/lift, Escalator serta Alat Pendingin Lainnya
- ❖ Reklasifikasi Keluar ke Persediaan senilai Rp546.094.372.000 terdapat pada Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian karena kesalahan pencatatan yang

seharusnya menjadi persediaan berupa Bantalan, Rel dan Wesel R.54

❖ Reklasifikasi Keluar senilai Rp40.302.295.000 terdapat pada

- Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp40.235.000.000 berupa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor Lainnya NUP 5 dan 6 menjadi Alat Angkutan Kereta Rel Lainnya NUP 1 dan 2
- Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian senilai Rp12.595.000 berupa Filing Cabinet Besi serta Lemari Besi/Metal
- Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai Rp54.700.000 berupa Filing Cabinet Besi, Meja Rapat dan Kursi Kayu

❖ Koreksi Manual senilai Rp186.053.042 terdapat pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

❖ Koreksi Pencatatan sebesar Rp14.766.836.955 terdapat pada

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp5.853.336.765 berupa koreksi nilai instalasi dan lisensi software untuk dikapitalisasi ke NUP Induk ke Komputer Unit Lainnya serta koreksi pencatatan karena kesalahan tanggal perolehan, setelah dikoreksi dilakukan pencatatan ulang dengan tanggal perolehan yang benar melalui menu saldo awal
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp579.670.500 berupa Koreksi pencatatan Meubelair Lainnya pada NUP 18, NUP 20-23, Printer NUP 62, serta Note Book NUP 8 yang dipecah untuk pendetailan
- Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan senilai Rp7.864.212.000 berupa koreksi pencatatan elevator/lift nup 46 untuk ditambahkan ke beberapa nup lain karena merupakan sparepart, condenser water pump, chilled water pump, submersible pump,

Elevator/Lift 2 unit, Alat Bengkel Bermesin Lainnya 1 unit serta Watt Meter 2 buah

- Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian senilai Rp435.601.740 berupa Gerbong Barang Terbuka 1 unit untuk dilakukan pemecahan
- Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp 34.015.950 berupa Gordyin/Kray 27 buah untuk dilakukan pendetailan

Gedung dan Bangunan **C.18 Gedung dan Bangunan**

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp6.764.052.517.282 dan Rp5.886.854.605.174.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp 5.886.854.605.174
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	Rp 304.749.271
Transfer Masuk	Rp 23.403.545.224
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 581.314.566.102
Reklasifikasi Masuk	Rp 117.100.765.897
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 40.628.039.928
Perolehan Lainnya	Rp 217.645.207.683
Pembelian	Rp 2.029.395.287
Koreksi Manual	Rp 4.962.635.295
Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	Rp 1
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	Rp (6.744.311.478)
Transfer Keluar	Rp (3.544.293.521)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp (60.704.687.284)
Koreksi Pencatatan	Rp (39.197.700.297)
Penghentian Aset dari Penggunaan	
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 6.764.052.517.282
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	Rp (676.492.983.541)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp 6.087.559.533.741

- Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan senilai Rp987.388.904.688 yang terdiri dari:

❖ Saldo Awal sebesar Rp304.749.271 terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan berupa:

- Gedung pos Jaga Permanen NUP 69 pekerjaan pemasangan Pos Jaga Lintas Serdang Bedagai (PJSB-

- 1) JPL 24 yang direklasifikasi keluar dari Jalan KA Bantalan Beton NUP 434.
- Gedung pos Jaga Permanen NUP 69 pekerjaan pemasangan Pos Jaga Lintas Serdang Bedagai (PJSB-1) JPL 25 yang direklasifikasi keluar dari Jalan KA Bantalan Beton NUP 435,-
- ❖ Pembelian sebesar Rp2.029.395.287 terdapat pada:
 - Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan senilai Rp839.135.359 berupa Bangunan Kantin, Kanopi, Bangunan Halte/Shelter serta Bangunan Gedung Kantor Lainnya
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp395.596.928 berupa Pagar Permanen berupa pengadaan Pagar Permanen Gedung Operasional BTP Bandung NUP 13
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang senilai Rp794.663.000 berupa Rumah Negara Golongan II Tipe Permanen 2c NUP 1 untuk rumah dinas Kepala Balai
- ❖ Koreksi Manual senilai Rp4.962.635.295 terdapat pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan berupa koreksi pada Bangunan Halte/Shelter
- ❖ Transfer Masuk sebesar Rp23.403.545.224 terdapat pada:
 - Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp3.544.293.521 berupa transfer pagar permanen sebanyak 1 unit dari Depo Depok dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp19.859.251.703 transfer masuk Bangunan Halte/Shelter stasiun pondok rajeg dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
- ❖ Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp40.628.039.928 terdapat pada
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp38.729.584.399 berupa bangunan halte / shelter
 - Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

senilai Rp693.359.507 merupakan penambahan dari Bangunan Kantin NUP 2 yang sebelumnya dikoreksi pencatatan untuk dikapitalisasi ke Bangunan Kantin NUP 1 serta Bangunan Depo Kereta Api

- Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp1.182.385.422
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang senilai Rp22.710.600 berupa penambahan pada nilai Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 1 karena pemakaian Pagar Panel sebanyak 72 batang dan kolom precast sebanyak 19 batang

❖ Reklasifikasi Masuk sebesar Rp117.100.765.897 terdapat pada

- Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp5.462.900.444 berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 5 reklasifikasi masuk dari Bangunan Gudang Terbuka Permanen NUP 1
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp95.147.532.000 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 35 Pembangunan Stasiun Paledang hasil reklasifikasi keluar dari Tanah Bangunan Stasiun Kereta Api NUP 1
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp304.749.272 berupa:
 - Gedung pos Jaga Permanen NUP 69 pekerjaan pemasangan Pos Jaga Lintas Serdang Bedagai (PJSB-1) JPL 24 yang direklasifikasi keluar dari Jalan KA Bantalan Beton NUP 434.
 - Gedung pos Jaga Permanen NUP 69 pekerjaan pemasangan Pos Jaga Lintas Serdang Bedagai (PJSB-1) JPL 25 yang direklasifikasi keluar dari Jalan KA Bantalan Beton NUP 435
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Rp16.185.584.182 berupa:
 - Bangunan Halte/Shelter NUP 74 Rp15.788.584.182 merupakan reklasifikasi masuk dari Jalan Kereta Api

- Bantalan Beton NUP 567 dan 572 berupa Pembangunan Stasiun Rangkasbitung
- Bangunan Halte/Shelter NUP 76 Rp397.000.000 merupakan reklasifikasi masuk dari Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 549 berupa Pekerjaan Bangunan Gedung Stasiun Cikarang yang selanjutnya dikapitalisasi ke Bangunan Halte/Shelter NUP 54.
- ❖ Perolehan Lainnya sebesar Rp217.645.207.683 terdapat pada
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp148.558.433.554 berupa Gedung Pos Jaga Permanen (pembangunan gedung pos jaga dan pintu perlintasan) yang merupakan hasil koreksi dari Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 926 serta pemecahan paket dari pekerjaan Track Jalur Ganda Mojokerto Sepanjang
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp1.796.140.697 berupa Pemecahan aset Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar) NUP 1 pada stasiun paledang
 - Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp67.290.633.432 berupa Pekerjaan Pagar Panel Tahap III Sistem Instalasi Pemadam Kebakaran (Hydrant)(MYC 2023-2024), Pekerjaan Gedung Fasilitas Perawatan Prasarana dan Pekerjaan Gudang Sparepart Bekas Balai Perawatan Perkeretaapian (MYC 2023-2024), Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Penunjang dan Pekerjaan Overcapping Stabling Balai Perawatan Perkeretaapian (MYC 2023-2024) serta Pekerjaan Gedung Fasilitas Perawatan Sarana (MYC 2023-2024)
- ❖ Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp581.314.566.102 terdapat pada
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp525.302.453.832 berupa Bangunan Halte/Shelter
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang senilai Rp56.012.112.270 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1 meliputi Pembangunan Bangunan

Operasional dan Gudang BTP Kelas II Padang beserta supervisi dan Detail Engineering Design (DED)

- Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan senilai Rp110.190.992.580 terdiri dari:
 - ❖ Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp60.704.687.284 terdapat pada
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung Rp50.182.387.284 berupa Gedung Bangunan Kantor Permanen NUP 35 berupa pengurangan nilai aset untuk tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK tanggal 27 Agustus 2024 dan Pengurangan nilai karena dilakukan pendetailan pemecahan aset ke perolehan lainnya sesuai nilai aset pada kontak pekerjaan satker dan tindak lanjut pengembalian belanja modal
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan Rp10.522.300.000 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 untuk dilakukan pendetailan aset dan pecah menjadi 13 NUP yang terdiri dari 1 NUP Gedung Stasiun, 5 NUP eskalator, 5 NUP elevator/lift dan 2 NUP genset
 - ❖ Transfer Keluar senilai Rp3.544.293.521,- terdapat Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta berupa transfer Pagar Permanen sebanyak 1 nup di Depo Depok kepada Balai Perawatan Perkeretaapian
 - ❖ Reklasifikasi Keluar senilai Rp6.744.311.478 terdapat pada
 - Balai Perawatan Perkeretaapian Rp5.462.900.444 berupa Bangunan Gudang Terbuka Permanen NUP 1 yang direklasifikasi masuk menjadi Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 5
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Rp1.281.411.034 berupa Bangunan Halte/Shelter NUP 72 yang direklasifikasi menjadi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) NUP 22
 - ❖ Koreksi Pencatatan sebesar Rp39.197.700.297 terdapat pada:

- Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan senilai Rp702.448.626 merupakan koreksi Bangunan Kantin NUP 2 untuk kemudian ditambahkan ke Bangunan Kantin NUP 1 serta Bangunan Gedung Kantor Lainnya
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Rp38.190.502.400 berupa Bangunan Halte/Shelter
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan Rp304.749.271 berupa koreksi saldo awal yang seharusnya diinput kembali sebagai reklasifikasi masuk setelah dilakukan reklasifikasi keluar terdiri dari:
 - Gedung pos Jaga Permanen NUP 69 pekerjaan pemasangan Pos Jaga Lintas Serdang Bedagai (PJSB-1) JPL 24.
 - Gedung pos Jaga Permanen NUP 69 pekerjaan pemasangan Pos Jaga Lintas Serdang Bedagai (PJSB-1) JPL 25

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp116.890.964.472.364

C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp116.890.964.472.364 dan Rp110.898.545.587.633.

Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

a. Mutasi Transaksi Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp 95.549.173.290.496
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	Rp 101.932.557.373
Reklasifikasi Masuk	Rp 20.339.785.706
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp 5.791.271.651.866
Perolehan Lainnya	Rp 967.516.580.423
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 937.898.578.488
Pembelian	Rp 128.661.881
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp (76.621.780.734)
Transfer Keluar	Rp (95.863.578.360)
Hibah Keluar	Rp (8.996.970.332)
Reklasifikasi Keluar	Rp (318.070.601.634)
Koreksi Pencatatan	Rp (1.726.111.169.212)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	Rp (49.564.080.160)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 101.093.032.925.801
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2024	Rp (68.068.005.700.012)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp 33.025.027.225.789

- Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan senilai Rp7.819.087.815.737 yang terdiri dari:
 - ❖ Pembelian senilai Rp128.661.881 terdapat pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan merupakan pekerjaan Perbaikan Jalan Akses Depan Depo LRT
 - ❖ Transfer Masuk sebesar Rp101.932.557.373 terdapat pada
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp6.068.979.013 berupa Jalur KA sepanjang Km.40+950 s.d Km.41+500 sepanjang 550 msp dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
 - Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp95.863.578.360 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton dengan kuantitas 19.000 m2 di Depo Depok dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
 - ❖ Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp5.791.271.651.866 terdapat pada:
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Rp980.523.846.252 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai

Rp1.877.128.851.014 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton serta Jalan Kereta Api Lainnya

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp2.860.708.695.621 berupa Pembangunan Skybridge Termasuk Pembangunan Stasiun Paledang Antara Bogor-Paledang Lintas Bogor-Sukabumi serta supervisi Pembangunan Skybridge Termasuk Pembangunan Stasiun Paledang Antara Bogor-Paledang Lintas Bogor-Sukabumi
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang senilai Rp42.456.706.389 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton serta Jembatan Pada Jalan Kereta Api Bantalan Beton
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp30.453.552.590 berupa:
 - Jalan KA Bantalan Beton NUP 431 penyelesaian dari Jalan Dalam Pengerjaan NUP 414 perbaikan Aspal Perlintasan Lintas Medan-Binjai, Medan-Tebing Tinggi, Tebing Tinggi-Siantar dan Perlintasan Jl. Mandala By Pass Lintas Medan-Araskabu.
 - Jalan KA Bantalan Beton NUP 432 penyelesaian dari Jalan Dalam Pengerjaan NUP 413 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pintu Perlintasan Lintas Serdang Bedagai.
 - Jalan KA Bantalan Beton NUP 434 penyelesaian dari Jalan Dalam Pengerjaan NUP 417 Pekerjaan Pemasangan Pos Jaga Lintas Serdang Bedagai.
 - Jalan KA Bantalan Beton NUP 435 penyelesaian dari Jalan Dalam Pengerjaan NUP 418 Pekerjaan Pemasangan Pos Jaga Lintas Serdang Bedagai.
 - Jalan KA Bantalan Beton NUP 433 penyelesaian dari Jalan Dalam Pengerjaan NUP 387 Pekerjaan Utilitas dan Penyempurnaan Antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung.
 - Jalan KA Bantalan Beton NUP 436 penyelesaian dari

Jalan Dalam Pengerjaan NUP 428 Pekerjaan Pengadaan Bantalan Beton Tahap II Sebanyak 10.000 Batang Lengkap dengan Alat Penambat Antara Medan Belawan Lintas Medan-Belawan.

- Jalan KA Bantalan Beton NUP 437 penyelesaian dari Jalan Dalam Pengerjaan NUP 429 Pekerjaan Pengadaan Concrete Level Crossing Type Narrow Gauge (Segmen 6 m)

❖ Perolehan Lainnya sebesar Rp967.516.580.423 terdapat pada

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp927.909.918.786 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton, Jembatan Pada Jalan Kereta Api Bantalan Beton serta Jembatan Fly Over
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp31.419.562.600 berupa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) NUP 4 merupakan pemecahan aset Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 35 Gedung Bangunan Stasiun Paledang
- Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp8.187.099.037 berupa Jalan Khusus Lainnya serta Jalan Kereta Api Lainnya

❖ Reklasifikasi Masuk senilai Rp20.339.785.706 terdapat pada:

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp13.095.876.672 berupa:
 - Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar) NUP 1 senilai Rp4.827.039.927 merupakan Pembangunan Pedestrian Skybridge Stasiun Paledang Antara Bogor-Paledang Lintas Bogor-Sukabumi yang direklasifikasi keluar dari Jalan Kereta Api Lainnya NUP 581
 - Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 788-789 senilai Rp8.268.836.745 merupakan pengadaan bantalan beton untuk pembangunan jalur ganda lintas St. Gedenage- St. Haurpugur sebanyak 31.000 unit dan

Pengadaan bantalan beton untuk penataan emplasemen stasiun padalarang dan stasiun bandung yang direklasifikasi masuk dari Gambar Tumbuhan/Botani NUP 1 dan 2

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp7.243.909.034 berupa:
 - Jembatan Penyeberangan Orang NUP 21 senilai Rp5.962.498.000 berupa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jati Baru reklasifikasi masuk dari Video NUP 1.
 - Jembatan Penyeberangan Orang NUP 22 senilai Rp1.281.411.034 berupa Jembatan Penyebrangan Orang Stasiun Tambun reklasifikasi masuk dari Bangunan Halte/Shelter NUP 72
- ❖ Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp937.898.578.488 terdapat pada:
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Rp142.624.559.523 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton Pecahan dari Paket B1: Railway Facility Construction for Bekasi to Cikarang Kontrak nomor 0971/DDT/SPP/X/2012, TANGGAL 10 oktober 2012 serta Jembatan Fly Over
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Rp57.220.626.149 merupakan:
 - Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 392 senilai Rp286.860.000,- merupakan pemecahan dari Paket B1: Railway Facility Construction for Bekasi to Cikarang Kontrak nomor 0971/DDT/SPP/X/2012, Tanggal 10 Oktober 2012 dan menjadi NUP 46 - 93 (Air Conditioner), koreksi penambahan karena kesalahan penginputan, dimana seharusnya pengurangan dilakukan terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan namun dilakukan koreksi terhadap NUP Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 392, sehingga dilakukan pengembalian atas koreksi tersebut

sehingga nilai NUP kembali ke nilai semula.

- Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 437 – 440 dan 510 – 511 dengan total nilai Rp24.264.769.152 merupakan kapitalisasi dari pemakaian material Pekerjaan Rel R.54 baru berikut pengelasan thermit sepanjang 28.400 M' Koridor Manggarai - Bogor Wilayah Daop 1 Jakarta
- Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 367 senilai Rp27.613.493.000 merupakan Jalan Kereta Api Lainnya NUP 494 dihapus (koreksi pencatatan) dan nilai dikapitalisasi ke Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 367.
- Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 563 senilai Rp3.937.181.255 merupakan Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 562 dihapus (koreksi pencatatan) dan nilai dikapitalisasi ke Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 563, lalu Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 563 direklasifikasi ke Jaringan Listrik Lainnya NUP 335.
- Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 567 senilai Rp1.118.322.742 merupakan Nilai Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 568, NUP 569, NUP 574 dijumlahkan dan dikapitalisasi ke Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 567, lalu Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 567 direklasifikasi ke Bangunan Halte / Shelter NUP 74
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung Rp2.170.399.803 berupa:
 - Jembatan Pada Jalan Kereta Api Bantalan Beton senilai Rp794.459.729
 - Jembatan Penyeberangan Orang senilai Rp477.870.724
 - Jalan Kereta Api Lainnya senilai Rp898.069.350
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp557.157.003.506 berupa Jalan Kereta Api Bantalan

Beton

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang senilai Rp94.253.081.300 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton serta Jembatan Pada Jalan Kereta Api Bantalan Beton
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang senilai Rp81.445.039.416 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton
 - Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp3.027.868.791 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton serta Jalan Kereta Api Lainnya
- Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan senilai Rp2.275.228.180.432 yang terdiri dari :
 - ❖ Transfer Keluar sebesar Rp95.863.578.360 terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton seluas 19.000 m² di Depo Depok yang ditransfer ke Balai Perawatan Perkeretaapian
 - ❖ Hibah Keluar senilai Rp4.507.860.616 terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang berupa Jembatan Penyeberangan Orang NUP 1 yaitu JPO KM.296+025 Antara Prupuk Linggapura Lintas Cirebon-Kroya kepada Pemerintah Kabupaten Tegal serta Jembatan Penyeberangan Orang NUP 3 Rp. 4.489.109.716,- yaitu JPO pada KM.351+200 Pasirmuncang di Kabupaten Banyumas kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas
 - ❖ Reklasifikasi Keluar senilai Rp318.070.601.634 terdapat
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp99.974.571.927
 - Jalan Kereta Api Lainnya NUP 580 Rp95.147.532.000 yang direklasifikasi keluar menjadi Tanah Bangunan Stasiun Kereta Api NUP 1.
 - Jalan Kereta Api Lainnya NUP 581 senilai Rp4.827.039.927 merupakan Pembangunan Pedestrian Skybridge Stasiun Paledang Antara Bogor-Paledang Lintas Bogor-Sukabumi yang direklasifikasi

keluar menjadi Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)
NUP 1

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp304.749.271 berupa:
 - Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 434 yaitu pekerjaan Pemasangan Pos Jaga Lintas Serdang Bedagai yang direklasifikasi menjadi Gedung Pos Jaga Permanen NUP 71.
 - Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 435 yaitu pekerjaan Pemasangan Pos Jaga Lintas Serdang Bedagai yang direklasifikasi menjadi Gedung Pos Jaga Permanen NUP 72
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp217.791.280.436 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton serta Jalan Kereta Api Lainnya
- ❖ Koreksi Pencatatan senilai Rp1.726.111.169.212 terdapat pada:
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan Rp561.354.588.785 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton.
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Rp1.095.828.330.741 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 926 pekerjaan pembangunan gedung pos jaga dan pintu perlintasan yang dicatatkan kembali menjadi Gedung Pos Jaga Permanen serta Jembatan Fly Over
 - Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan senilai Rp128.661.881 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 2 merupakan pekerjaan perbaikan jalan akses menuju depo sehingga dikoreksi ke dalam Bangunan Depo Kereta Api NUP 2
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang senilai Rp63.084.184.808 berupa Jalan Kereta Api Bantalan Beton, Jembatan Pada Jalan Kereta Api Bantalan Beton serta Jembatan Pada Jalan Kereta Api Bantalan Kayu

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp5.715.402.997 berupa:
 - Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 562 Rp3.937.181.255 yang dilakukan koreksi pencatatan dan dikapitalisasi ke Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 563
 - Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 568, 569, dan 574 Rp1.118.322.742 berupa penjumlahan dari NUP 568, NUP 569, NUP 574 dan dikapitalisasi ke Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 567, lalu Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 567 direklasifikasi ke Bangunan Halte/ Shelter NUP 74
 - Jalan Kereta Api Lainnya NUP 494 Rp659.899.000 yang dilakukan koreksi pencatatan dan dikapitalisasi ke Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 367
- ❖ Reklasifikasi Keluar ke Persediaan senilai Rp49.564.080.160 terdapat pada:
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan Rp12.577.080.160 terdiri dari:
 - Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 436 senilai Rp10.319.500.000 berupa Pengadaan Bantalan Beton Tahap II Sebanyak 10.000 Batang Lengkap dengan Alat Penambat Antara Medan Belawan Lintas Medan-Belawan sebanyak 10.000 unit.
 - Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 437 senilai Rp2.257.580.160 berupa Pengadaan Concrete Level Crossing Type Narrow Gauge (Segmen 6 m) sebanyak 8 unit.
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Rp36.987.000.000 terdiri dari:
 - Pengadaan Bantalan Beton Lengkap Berikut Penambat Elastis Sebanyak 15.000 batang dengan nomor kontrak 01/SPP-PBJK-1/SBSN/PPJT2/BTP-SBY/IV/2023, Tanggal 06 April 2023 dengan PT. Tjkindro Mas Rp13.215.000.000.

- Pengadaan Bantalan Beton Lengkap Berikut Penambat Elastis Sebanyak 15.000 batang dengan nomor kontrak 01/SPP-PBJK-2/SBSN/PPJT2/BTP-SBY/V/2023, Tanggal 11 Mei 2023 dengan PT. Calvary Rp13.200.000.000.
- Pengadaan Bantalan Beton Lengkap Berikut Penambat Elastis Sebanyak 12.000 batang dengan nomor kontrak 01/SPP-PBJK-3/SBSN/PPJT2/BTPSBY/IX/2023, Tanggal 22 September 2023 dengan PT WIKA Beton Rp10.572.000.000
- ❖ Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang senilai Rp76.621.780.734 terdapat pada
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp15.348.628.768 berupa:
 - Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 392 menjadi 3 buah Track Motor Car NUP 2, 3, dan 4 senilai Rp15.348.628.768 berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Seksi Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian Nomor ND/K4/319/BTP-JKT/2024
 - Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 392 Rp286.860.000 menjadi Air Conditioner NUP 46-93
 - Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 367 Rp26.953.594.000 Jalan Kereta Api Lainnya NUP 494 dihapus (koreksi pencatatan) dan nilai dikapitalisasi ke Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 367. Terdapat kesalahan Input Koreksi Nilai Bertambah senilai Rp26.953.594.000 sehingga dilakukan Koreksi Nilai Berkurang kembali senilai Rp26.953.594.000
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp1.376.182.750 berupa Pengembalian belanja modal temuan audit BPK TA.2023
 - Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai Rp6.260.248 berupa kelebihan bayar pembangunan jalan akses dan fasilitas pendukung Stasiun Rammang-rammang sebesar (Jalan Lainnya NUP 2)

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp5.738.899.016 berupa Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar) NUP 1 serta Jalan Kereta Api Lainnya NUP 582 yang dilakukan untuk pendetailan pemecahan aset ke perolehan lainnya sesuai nilai aset pada kontrak
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang senilai Rp27.192.000.000 merupakan pengurangan nilai dari Jalan Kereta Api Bantalan Beton NUP 1305 akibat pengurangan nilai untuk pengadaan wesel persediaan
- Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp205 merupakan pengurangan dari Jalan Khusus Lainnya NUP 2 karena kesalahan perhitungan saat pemecahan kontrak
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang senilai Rp6.215.747 merupakan pengurangan dari Jembatan Pada Jalan Kereta Api Bantalan Beton

b. Mutasi Transaksi Irigasi adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp 1,957,750,779,796
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	Rp 48,747,097,169
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 11,376,535
Perolehan Lainnya	Rp 33,178,695,125
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	Rp (48,747,097,169)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 1,990,940,851,456
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2024	Rp (550,222,884,236)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp 1,440,717,967,220

- Mutasi Tambah Irigasi senilai Rp81.937.168.829 terdiri dari:
 - ❖ Transfer Masuk senilai Rp48.747.097.169 terdapat pada Balai Perawatan Perkeretaapian dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta berupa Bangunan (Box) Culvert sebanyak 2 unit yang merupakan bagian dari Depo Depok
 - ❖ Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp11.376.535 terdapat pada Balai Perawatan Perkeretaapian berupa

Bangunan (Box) Culvert NUP 3-6 penambahan dari nilai supervisi Pekerjaan Gedung Fasilitas Perawatan Prasarana dan Pekerjaan Gudang Sparepart Bekas Balai Perawatan Perkeretaapian (MYC 2023-2024)

❖ Perolehan Lainnya senilai Rp33,178,695,125 terdapat pada:

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp31.477.285.068 berupa hasil dari pemecahan Paket Pekerjaan Track Mojokerto-Sepanjang
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp1.182.449.570 berupa Saluran Drainase Pedestrian Stasiun Paledang NUP 5 dan 6 yang merupakan pemecahan aset Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar) NUP 1 pada Stasiun Paledang
- Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp518.960.487 berupa Bangunan (Box) Culvert NUP 3 pemecahan kontrak Pekerjaan Gedung Fasilitas Perawatan Prasarana dan Pekerjaan Gudang Sparepart Bekas Balai Perawatan Perkeretaapian (MYC 2023-2024)

• Mutasi kurang Irigasi senilai Rp48.747.097.169 terdiri dari:

❖ Transfer Keluar senilai Rp48.747.097.169 terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta ke Balai Perawatan Perkeretaapian berupa Bangunan (Box) Culvert sebanyak 2 unit yang merupakan bagian dari Depo Depok

c. Mutasi Transaksi Jaringan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	Rp 13,391,621,517,341
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp 14,973,235
Transfer Masuk	Rp 62,272,624,923
Reklasifikasi Masuk	Rp 184,676,687,254
Perolehan Lainnya	Rp 194,241,205,283
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 6,442,379,350
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp 240,024,242,000
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	Rp (59,848,805,771)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp (13,212,340,598)
Koreksi Pencatatan	Rp (199,241,787,910)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 13,806,990,695,107
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2024	Rp (3,960,500,299,821)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp 9,846,490,395,286

- Mutasi Tambah Jaringan senilai Rp687.672.112.045 terdiri dari:
 - ❖ Pembelian senilai Rp14.973.235 terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta berupa Instalasi Komputer NUP 2 yang merupakan instalasi dan lisensi software
 - ❖ Transfer Masuk sebesar Rp62.272.624.923 terdapat pada
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp2.423.819.152 berupa jaringan listrik stasiun pondok rajeg, transfer dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
 - Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp59.848.805.771 dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta yang merupakan bagian dari Depo Depok terdiri dari:
 - Jaringan Listrik Lainnya NUP 329 senilai Rp53.506.464.550 berupa OHC dan Power Distribution.
 - Instalasi Gardu Listrik Lainnya NUP 3 senilai Rp6.342.341.221 berupa Substation System Depo Depok
 - ❖ Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp240.024.242.000 terdapat pada:
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai

Rp214.961.144.000 berupa:

- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Besar NUP 2 berupa Update Sistem Pemantauan Persinyalan Terpusat Lintas Jombang Mojokerto di CTS Madiun Rp4.064.785.000
- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Besar NUP 23 berupa pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api antara Sepanjang - Mojokerto lintas Surabaya – Solo Rp192.989.140.000
- Jaringan Telepon diatas tanah kapasitas kecil NUP 3 Pembangunan Pintu Perlintasan (JPL) Rp17.907.219.000
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp25.063.098.000 berupa Jaringan Listik Lainnya NUP 333 Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian Di Jabodetabek "Pekerjaan Listrik Aliran Atas Stasiun Manggarai"
- ❖ Reklasifikasi Masuk senilai Rp184.676.687.254 terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta berupa:
 - Jaringan Listik Lainnya NUP 334 untuk pekerjaan pembangunan fasilitas operasi di Emplasemen Stasiun Tambun;
 - Jaringan Listik Lainnya NUP 335 Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Sta. Cikarang – Sta. Cikampek
- ❖ Perolehan Lainnya senilai Rp194.241.205.283 terdapat pada
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp184.176.727.243 berupa Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Besar Pemecahan dari Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api antara Sepanjang - Mojokerto Lintas Surabaya – Solo (STMS)
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai

- Rp9.126.545.800 merupakan Pemecahan aset Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 35 Gedung Bangunan Stasiun Paledang
- Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp937.932.240 berupa Jaringan Distribusi Lainnya NUP 1 Panel Distribusi dan merupakan pemecahan paket Pekerjaan Gedung Fasilitas Perawatan Prasarana dan Pekerjaan Gudang Sparepart Bekas Balai Perawatan Perkeretaapian (MYC 2023-2024)
 - ❖ Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp6.442.379.350 terdapat pada
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp6.250.647.910 berupa Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Besar NUP 23 berupa penambahan nilai kegiatan Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api antara Sepanjang - Mojokerto lintas Surabaya – Solo dari Jaringan Dalam Pengerjaan serta penambahan nilai kegiatan Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api antara Sepanjang - Mojokerto lintas Surabaya – Solo dari Jaringan Dalam Pengerjaan
 - Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp20.561.142 berupa Jaringan Distribusi Lainnya NUP 1-6 merupakan pemecahan paket Pekerjaan Gedung Fasilitas Perawatan Prasarana dan Pekerjaan Gudang Sparepart Bekas Balai Perawatan Perkeretaapian (MYC 2023-2024)
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp14.973.235 berupa koreksi nilai instalasi (nilai digabung ke Komputer Unit Lainnya NUP 3) sesuai surat keterangan nomor SKET-BTP-JKT 90 Tahun 2024 tanggal 7 November 2024
 - Mutasi Kurang Jaringan senilai Rp272.302.934.279 terdiri dari:
 - ❖ Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang senilai

Rp13.212.340.598 terdapat pada

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp342.340.596 yaitu nilai Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Besar NUP 23 berupa pengembalian belanja karena terdapat kelebihan bayar berdasarkan Temuan Audit BPK Tahun 2023 Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api antara Sepanjang - Mojokerto lintas Surabaya – Solo
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang senilai Rp12,870.000.000 dari nilai Instalasi Pengaman Lainnya NUP 29 akibat pengurangan nilai untuk pengadaan wesel persediaan
- Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp2 dari nilai Jaringan Distribusi Lainnya NUP 6 Panel Distribusi karena kesalahan perhitungan pada saat pemecahan paket Pekerjaan Gedung Fasilitas Perawatan Prasarana dan Pekerjaan Gudang Sparepart Bekas Balai Perawatan Perkeretaapian (MYC 2023-2024)

❖ Koreksi Pencatatan senilai Rp199.241.787.910 terdapat pada

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp199.239.787.910 berupa Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api antara Sepanjang - Mojokerto Lintas Surabaya – Solo yang dilakukan Pemecahan Paket ke beberapa jenis barang
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp2.000.000 berupa Instalasi Komputer NUP 2 yang merupakan biaya instalasi dan materials sehingga dikoreksi dan ditambahkan ke NUP fisik Komputer Unit Lainnya

❖ Transfer Keluar senilai Rp59.848.805.771 terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta ke Balai Perawatan Perkeretaapian yang merupakan bagian dari Depo Depok berupa:

- Jaringan Listrik Lainnya NUP 329 senilai Rp53.506.464.550 berupa OHC dan Power Distribution.
- Instalasi Gardu Listrik Lainnya NUP 3 senilai Rp6.342.341.221 berupa Substation System Depo Depok. berupa pemecahan aset Depo KRL Solo Jebres yaitu Jaringan Listrik Lainnya NUP 14

Aset Tetap
Lainnya Rp
Rp547.630.360
.492

C.20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp547.630.360.492 dan Rp547.630.360.492.

Saldo per 31 Desember 2023	Rp 547.630.360.492
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp 550.000.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 220.338.696.118
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	Rp (220.338.696.118)
Reklasifikasi Keluar	Rp (550.000.000)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 547.630.360.492
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp 547.630.360.492

- Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya senilai Rp220.888.696.118 terdiri dari:
 - ❖ Pembelian senilai Rp550.000.000 terdapat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa video sebanyak 20 buah.
 - ❖ Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp220.338.696.118 terdapat pada Balai Perawatan Perkeretaapian
- Mutasi Kurang senilai Rp. 220.888.696.118 terdiri dari:
 - ❖ Reklasifikasi Keluar senilai Rp550.000.000 terdapat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa video sebanyak 20 buah yang direklasifikasi keluar menjadi

Cabinet Indoor Videotron

- ❖ Koreksi Pencatatan senilai Rp220.338.696.118 terdapat pada Balai Perawatan Perkeretaapian yang selanjutnya dicatatkan kembali dengan kode dan jenis barang yang sesuai

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp14.556.019.661.925

C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.556.019.661.925 dan Rp18.906.539.058.274 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

No	Nama Balai/Satker	Jumlah
1	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	2,565,148,445,380
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	902,770,344,795
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	2,151,844,120,966
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	294,200,666,681
5	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	5,240,781,177,463
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	93,262,201,299
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	485,751,516,039
8	Balai Perawatan Perkeretaapian	1,504,600,000
9	Balai Pengujian Perkeretaapian	1,317,069,500
10	Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	219,961,724,142
11	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	114,521,851,068
12	Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	1,915,241,239,829
13	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	569,714,704,763
TOTAL		14,556,019,661,925

Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi

Penyusutan

(Rp78.846.942.198.451)

C.22 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing (Rp78.846.942.198.451) dan (Rp72.020.801.422.792).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	6,442,210,614,393	5,591,720,330,841	850,490,283,552
2	Gedung dan Bangunan	6,764,052,517,282	676,492,983,541	6,087,559,533,741
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	116,890,964,472,364	72,578,728,884,069	44,312,235,588,295
4	Aset Tetap Lainnya	547,630,360,492	-	547,630,360,492
Akumulasi Penyusutan		130,644,857,964,531	78,846,942,198,451	51,797,915,766,080

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

*Aset Konsesi
Jasa
Rp116.616.230
.616.249*

C.23 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp116.616.230.616.249 dan Rp116.941.150.373.911 yang merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang: (a) disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau (b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Rincian Aset Konsesi Jasa

No	Aset Konsesi Jasa	Nilai
1	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	1,598,855,056,027
	- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	
	Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Tanah)	1,324,473,899,027
	- PT Celebes Railway Indonesia	
2	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	114,895,437,321,003
	- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	
	Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Bandar Udara Soekarno Hatta Melalui Kota Tangerang (Non Tanah)	2,414,560,953,619
	- PT Celebes Railway Indonesia	
3	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	121,938,239,219
	Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Non Tanah)	121,938,239,219
	Jumlah	116,616,230,616,249

Rincian Aset Konsesi Jasa disajikan pada lampiran.

Akumulasi

Penyusutan

Aset Konsesi Jasa

(Rp3.875.588.387.441)

C.24 Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing (Rp3.875.588.387.441) dan (Rp1.357.003.087.511).

Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa merupakan kontra akun Aset Konsesi Jasa yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Konsesi Jasa.

Properti

Investasi

Rp1.422.000.778.000

C.25 Properti Investasi

Nilai Perolehan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.422.000.778.000 dan Rp1.422.000.778.000. Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun properti investasi tersebut dicatat pada Balai

Perawatan Perkeretaapian berupa Tanah seluas 262.079m² senilai Rp1.360.378.316.000 dan Bangunan seluas 16.161,27m² senilai Rp61.622.462.000 pada lokasi Depo Depok, Jawa Barat yang disewakan kepada PT Kereta Commuter Indonesia untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek selama 1 Tahun. Dengan Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan nomor HK.201/1/7/BPWKA/2024; 248/CL.201/KCI/IX/2024 tanggal 13 September 2024

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Properti
Investasi
(Rp7.394.695.434)*

C.26 Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing (Rp7.394.695.434) dan (Rp6.162.246.194).

Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa merupakan kontra akun Aset Konsesi Jasa yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Konsesi Jasa.

*Aset Tak
Berwujud
Rp153.009.331.664*

C.27 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp153.009.331.664 dan Rp121.504.862.690. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud 30 Juni 2024

No	Aset Tak Berwujud	Nilai
1	Software	5,828,699,445
2	Hasil Kajian /Penelitian	97,770,844,305
3	ATB Lainnya	49,409,787,914
Jumlah		153,009,331,664

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp 121,504,862,690
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	Rp 945,538,000
Pembelian	Rp 2,964,153,984
Reklasifikasi Masuk	Rp 16,929,009,000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp 11,611,305,990
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	(945,538,000)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 153,009,331,664
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp (5,154,542,406)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp 147,854,789,258

- Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp32.450.006.974 terdiri dari
 - ❖ Pembelian senilai Rp2.964.153.984 terdapat pada Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan berupa:
 - Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Jalur Kereta Api Antra Mandai-Makassar New Port dan Siding Track Bandara Sultan Hasanuddin (SC. 603) senilai Rp1.766.802.984
 - Review Desain Pembangunan Bangunan Depo Kereta Api Maros (SC.702) senilai Rp246.387.000
 - Review Desain Pembangunan Bangunan Depo Kereta Api Maros (SC.701) senilai Rp390.964.000
 - ❖ Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp11.611.305.990 terdapat pada:
 - Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api senilai Rp9.336.822.990 merupakan Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP dari Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
 - Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai Rp2.274.483.000 merupakan Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP dari Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
 - ❖ Reklasifikasi Masuk senilai Rp16.929.009.000 terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta berupa Jalan Kereta Api Lainnya

- ❖ Transfer Masuk senilai Rp945.538.000 terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya merupakan pencatatan kembali melalui Perolehan Lainnya setelah direklasifikasi menjadi Jalan Dalam Pengerjaan, aset yang diterima dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud sebesar Rp945.538.000 terdiri dari

- ❖ Koreksi Pencatatan senilai Rp945.538.000 terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya yang dikoreksi pencatatan untuk dicatat ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (Jalan Dalam Pengerjaan)

Rincian Aset Tak Berwujud lebih lanjut disajikan pada lampiran.

Disamping itu masih terdapat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan sebesar Rp355.433.740.723 berupa hasil kajian dan aset tak berwujud lainnya yang pengerjaannya sampai dengan tanggal neraca belum selesai. Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan lebih lanjut disampaikan pada lampiran.

*Dana yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp1.089.108.174.466*

C.28 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.089.108.174.466 dan Rp331.219.245.833. Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan

diterima.

No	Nama Balai/Satker	Jumlah
163139 Dana di Rekening Penampungan-K/L		
1	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	4.933.325.873
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	173.175.601.471
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	186.982.634.506
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	140.392.893.755
5	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	71.523.313.626
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	10.736.505.509
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	151.531.155.786
8	Balai Perawatan Perkeretaapian	6.167.835.532
9	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	49.405.490.112
10	Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	20.071.475.593
11	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	21.523.285.818
12	Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	12.809.338.966
13	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	238.741.304.398
163119 Dana Lainnya		
1	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	908.758.521
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	205.255.000
TOTAL		1.089.108.174.466

Rincian lebih lanjut dari Dana yang Dibatasi Penggunaannya disajikan dalam lampiran.

Aset Lain-Lain
Rp7.716.570.806

C.29 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp7.716.570.806 dan Rp8.449.377.233. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp 8,449,377,233
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp 6,222,683,710
Mutasi kurang:	
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	Rp (6,955,490,137)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 7,716,570,806
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2024	Rp (7,716,570,806)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

- Mutasi tambah Aset Lain-lain senilai Rp6.222.683.710 terdiri dari:
 - ❖ Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp6.222.683.710 yang terdapat pada:
 - Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas

- Keselamatan Perkeretaapian senilai Rp82.435.200 berupa Lemari Besi/Metal
- Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api senilai Rp117.159.285 berupa Kursi Besi/Metal, Alat Penghancur Kertas, Rak Besi serta Genset
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp106.501.643 berupa Scanner (Peralatan Personal Komputer), Facsimile serta P.C Unit
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp123.752.122 berupa peralatan perkantoran sebanyak 85 buah.
 - Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian senilai Rp3.052.341.250 berupa Printer (Peralatan Personal Komputer), Lap Top serta Workstation
 - Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp1.129.730.750 berupa peralatan perkantoran sebanyak 11 buah serta Station Wagon sebanyak 3 unit
 - Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian senilai Rp463.573.460 berupa Mobil Patroli serta Sepeda Motor
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp1.147.190.000 berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebanyak 4 unit
- Mutasi kurang Aset Lain-lain senilai Rp6.955.490.137 terdiri dari:
 - ❖ Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp6.955.490.137 terdapat pada:
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang senilai Rp379.244.362 berupa peralatan perkantoran sebanyak 90 buah.
 - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp285.000.000 berupa peralatan perkantoran sebanyak 79 buah.

- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang senilai Rp634.819.000 berupa 2 unit station wagon
- Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian senilai Rp463.573.460 berupa Mobil Patroli serta Sepeda Motor
- Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian senilai Rp2.878.524.500 berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), Sedan serta Pick Up
- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp2.314.328.815 berupa Jeep, Sepeda Motor, Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(12.871.113.
212)*

C.30 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(12.871.113.212) dan Rp(13.222.360.002). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	5,828,699,445	5,154,542,406	674,157,039
2	Hasil Kajian/Penelitian	97,770,844,305	-	97,770,844,305
3	ATB Lainnya	49,409,787,914	-	49,409,787,914
4	ATB Dalam Pengerjaan	355,433,740,723	-	355,433,740,723
	Jumlah	508,443,072,387	5,154,542,406	503,288,529,981
B	Aset Lain-lain	7,716,570,806	7,716,570,806	-
	Jumlah	7,716,570,806	7,716,570,806	-
	Total	516,159,643,193	12,871,113,212	503,288,529,981

Untuk ATB yang masa manfaatnya tidak terbatas dan tidak dilakukan amortisasi, evaluasi kemanfaatan dilakukan terhadap masih atau tidak bermanfaatnya suatu ATB, belum terkait jangka waktu apakah suatu ATB memiliki masa manfaat tidak terbatas atau tidak disusutkan

Utang kepada

C.31 Utang kepada Pihak Ketiga

Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan Rp944.802.855 2023 masing-masing sebesar Rp944.802.855.444 dan .444 Rp307.782.255.832. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	2,002,425,438
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2,321,989,997	5,145,843,603
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	941,366,851,926	299,519,973,270
Dana Pihak Ketiga	1,114,013,521	1,114,013,521
Jumlah	944,802,855,444	307,782,255,832

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan pada pengungkapan lainnya.

Terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor senilai Rp269.489.257 pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I semarang sebesar Rp36.747.023; serta Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp232.742.234

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.32 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.33 Hibah Yang Belum Disahkan

Saldo Hibah Langsung Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp12.038.106.388. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disingkat Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa

dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp190.249.151*

C.34 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp190.249.151 dan Rp1.257.017.775. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Pendapatan Diterima di Muka pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan pada beberapa instansi. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan swasta	190.249.151	
Instansi Pemerintah	-	
Badan lainnya		
Total	190.249.151	

Pendapatan tersebut adalah Pendapatan Diterima Dimuka atas Kerjasama Pemasangan Iklan pada Parapet Sisi Jembatan Ampera LRT Sumatera Selatan bersama PT Mukti Citra Jaya (jangka waktu kerja sama dari 1 November 2023 hingga 1 November 2025)

*Utang Jangka
Panjang Dalam
Negeri Lainnya
Rp2.687.370.1
34.451*

C.35 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.687.370.134.451 dan Rp0. Utang Jangka Panjang dalam negeri merupakan utang kepada pihak dalam negeri yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri senilai Rp2.687.370.134.451 merupakan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada Satker Pengembangan,

Peningkatan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian merupakan kekurangan pembayaran (*Backlog*) atas pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian / *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) PT KAI Tahun 2023.

Penjelasan lebih rinci terkait Cost Overrun pembangunan prasarana LRT Jabodebek dan Backlog IMO PT KAI Tahun 2023 disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pos Catatan Penting Lainnya.

Kewajiban

Konsesi Jasa

Rp111.088.502.366.120

C.36 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp111.088.502.366.120 dan Rp113.992.681.926.095. Kewajiban konsesi jasa adalah kewajiban yang timbul karena perjanjian konsesi jasa. Ketika pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra untuk biaya penyediaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik dalam bentuk serangkaian pembayaran yang telah ditentukan, jumlah yang mencerminkan bagian dari serangkaian pembayaran tersebut diakui sebagai kewajiban.

Satker	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Keterangan
BTP Kelas I Jakarta	27,230,634,224,198	28,407,660,188,282	Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra
BTP Kelas I Bandung	82,943,184,903,382	84,635,902,962,634	Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra
Balai Pengelola Kereta Api Sulsel	914,683,238,540	949,118,775,179	Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pembayaran Kepada Mitra
Jumlah	111,088,502,366,120	113,992,681,926,095	

Ekuitas

Rp232.782.395.707.006

C.37 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp232.782.395.707.006 dan Rp234.788.690.640.291. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam

Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp1.664.123.073

.264

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.664.123.073.264 dan Rp180.666.585.667. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNBP			
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan jasa Lainnya	89,552,593,242	77,553,508,725	15.47
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2,588,076,542	4,659,762,848	(44.46)
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1,027,507,138	83,955,444	1,123.87
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1,073,992,182	175,375,000	512.40
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	88,154,219,993	56,525,046,708	55.96
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	28,429,615,470	2,075,160,307	1,270.00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1,140,225,000	1,574,035,000	(27.56)
Pendapatan Pengujian Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	3,697,635,000	3,672,520,000	0.68
Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1,435,499,535,886	23,581,051,948	5,987.51
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	3,937,176,000	2,647,800,000	48.70
Pendapatan Jasa Lainnya	3,314,307,007	3,200,442,000	3.56
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	5,260,143,236	1,171,108,091	349.16
Pendapatan Denda Lainnya	18,802,560	-	100.00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	429,244,008	3,746,819,596	0.00
Jumlah	1,664,123,073,264	180,666,585,667	821.10

Pendapatan PNBP berasal dari sewa dan perizinan, jasa pekerjaan dan pelatihan, bunga serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya terdapat pada Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api serta Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian berupa pemberian izin, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan terdapat pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan

Prasarana Perkeretaapian, Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian serta Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian berupa pengujian berkala dan sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian. Perbedaan nilai realisasi PNBPN pada LRA dan LO disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan pada akun-akun berikut:

- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya: Rp87.194.428.542
- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha: Rp1.492.165.100
- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan: Rp1.102.783.000
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Rp1.429.268.556
- Pendapatan Pengujian. Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan: Rp3.717.775.000
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu: Rp89.373.454
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu: Rp10.525.564.918
- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu: Rp28.250.006.483

Beban Pegawai

Rp184.186.522.9

84

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp184.186.522.984 dan Rp138.903.669.345. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	60,259,158,430	50,569,378,370	19.16
Beban Pembulatan Gaji PNS	9,779,470	958,510	920.28
Beban Tunjangan Suami/istri PNS	2,960,859,010	2,597,038,092	14.01
Beban Tunjangan Anak PNS	833,475,492	748,629,812	11.33
Beban Tunjangan Struktural PNS	1,214,740,000	1,134,150,000	7.11
Beban Tunjangan Fungsional PNS	1,389,199,000	1,426,510,800	(2.62)
Beban Tunjangan PPh PNS	346,958,437	92,872,897	273.58
Beban Tunjangan Beras PNS	2,889,437,340	2,683,850,620	7.66
Beban Uang Makan PNS	7,858,959,000	7,942,123,270	(1.05)
Beban Tunj. Khusus Peralihan PNS	9,555,000	-	100.00
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri		1,052,107	(100.00)
Beban Tunjangan Umum PNS	2,912,805,500	2,641,606,400	10.27
Beban Gaji Pokok PPPK	7,404,892,600	503,852,000	1,369.66
Beban Pembulatan Gaji PPPK	122,218	2,216	5,415.25
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	408,380,910	23,221,120	1,658.66
Beban Tunjangan Anak PPPK	90,271,074	5,330,640	1,593.44
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,079,720,000	86,880,000	1,142.77
Beban Tunjangan Beras PPPK	368,400,540	24,912,480	1,378.78
Beban Uang Makan PPPK	1,114,537,000	20,575,000	5,316.95
Beban Uang Lembur	59,014,000	-	100.00
Beban Uang Lembur PPPK	3,235,000	-	100.00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	82,790,676,560	67,672,806,211	22.34
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/ Kinerja PPPK	10,182,346,403	727,918,800	1,298.83
Jumlah	184,186,522,984	138,903,669,345	32.60

Beban

Persediaan

Rp15.591.563.44

6

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.591.563.446 dan Rp19.924.826.438.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	30 September 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	15,591,563,446	19,924,826,438	(21.75)
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	15,591,563,446	19,924,826,438	(21.75)

Beban Barang dan Jasa D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp822.188.647.996 dan Rp916.798.345.311.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	27,137,463,993	30,387,132,948	(10.69)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2,356,397,453	3,259,534,463	(27.71)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,184,808	4,057,350	3.14
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	23,509,904,350	39,280,369,347	(40.15)
Beban Barang Operasional Lainnya	18,480,956,973	20,566,861,436	(10.14)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	208,056,837	(100.00)
Beban Bahan	5,126,422,553	2,722,712,329	88.28
Beban Honor Output Kegiatan	1,715,696,608	3,811,366,482	(54.98)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	221,277,817,873	254,685,626,349	(13.12)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabe	13,255,000	-	100.00
Beban Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	233,054,281,545	235,661,768,105	(1.11)
Beban Langganan Listrik	37,529,710,537	66,777,313,125	(43.80)
Beban Langganan Telepon	408,533,947	901,107,587	(54.66)
Beban Langganan Air	334,863,065	332,694,471	0.65
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,566,112,796	2,035,247,163	26.08
Beban Jasa Konsultan	43,446,351,756	118,711,314,672	(63.40)
Beban Sewa	34,386,593,458	32,816,910,144	4.78
Beban Jasa Profesi	3,351,654,000	3,910,966,280	(14.30)
Beban Jasa Lainnya	146,946,658,623	78,017,320,961	88.35
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	2,153,450	(100.00)
Beban Barang	6,605,870,492	6,624,346,128	(0.28)
Beban Jasa	7,873,953,226	9,408,239,904	(16.31)
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6,023,689,940	6,667,841,020	(9.66)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	14,425,000	1,904,760	100.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	23,850,000	3,500,000	100.00
Jumlah	822,188,647,996	916,798,345,311	(10.32)

Beban Pemeliharaan D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah

Rp1.368.488.211 masing-masing sebesar Rp1.368.488.211.286 dan .286 Rp612.280.833.816. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangun	20,967,765,886	26,172,000,367	(19.88)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	102,305,370.00	-	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39,833,608,517	28,584,877,674	39.35
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169,098,380	1,048,951,412	(83.88)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,191,247,653,169	522,998,467,914	127.77
Beban Pemeliharaan Jaringan	2,119,828,080	-	100.00
Beban Pemeliharaan Lainnya	11,568,964,168	8,714,347,351	32.76
Beban Pemeliharaan	1,608,124,831	1,699,289,981	(5.36)
Beban Persediaan Suku Cadang	100,870,862,885	23,062,899,117	337.37
Jumlah	1,368,488,211,286	612,280,833,816	123.51

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp153.505.402.
413*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp153.505.402.413 dan Rp152.692.679.748. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	104,591,569,733	105,211,078,423	(0.59)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,374,440,740	2,224,618,519	6.73
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,269,767,695	8,578,357,505	(3.60)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20,635,382,074	23,284,320,347	(11.38)
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	2,626,381,974	1,532,111,643	71.42
Beban Perjalanan	15,007,860,197	11,862,193,311	26.52
Jumlah	153,505,402,413	152,692,679,748	0.53

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0.-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan pita cukai materai dan leges	0	0	0.00
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2024

dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban

Penyusutan

dan Amortisasi

p7.911.414.251.

765

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.295.739.805.003 dan Rp9.257.700.256.563. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	256,160,582,472	300,522,311,186	(14.76)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	134,133,623,982	119,352,199,297	12.38
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5,039,477,503,546	7,301,391,206,705	(30.98)
Beban Penyusutan Irigasi	76,981,056,952	76,593,903,075	0.51
Beban Penyusutan Jaringan	525,729,968,754	513,873,288,806	2.31
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipas	2,261,643,060,420	944,474,182,923	139.46
Beban Penyusutan Properti Investasi	1,232,449,240	1,232,449,240	-
Beban Amortisasi Software	381,559,637	260,715,331	46.35
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	8,295,739,805,003	9,257,700,256,563	(0.10)

Adapun penurunan Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar 30,98% dibanding tahun sebelumnya diakibatkan karena terdapat reklas keluar Jalan Kereta Api Bantalan Beton ke Persediaan sehingga terdapat penurunan Beban Penyusutan

Jalan dan Jembatan pada tahun berjalan.

Beban

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan

Piutang Tak
terttagih

Rp17.571.133

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidakterttagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.571.133 dan Rp5.778.550. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	17,569,373	5,778,550	204.04
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,760	-	100.00
Jumlah Beban Penyisihan	17,571,133	5,778,550	204.08

Surplus/Defisit
dari Kegiatan
NonOperasional
Rp2.296.414.53
2.270

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.296.414.532.270 dan Rp966.320.109.336. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset	(7,074,634,663)	33,876,224,011	(1.21)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,303,489,166,933	932,443,885,325	1.47
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	2,296,414,532,270	966,320,109,336	1.38

Pos-Pos Luar Biasa Rp0 **D.12 POS-POS LUAR BIASA**

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	-	-	-
Pos Luar Biasa	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i>	E.1 Ekuitas Awal
<i>Rp234.788.690.640.291</i>	Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp234.788.690.640.291 dan Rp238.747.955.814.382
<i>Defisit LO</i>	E.2 Surplus/Defisit LO
<i>(Rp6.879.180.118.727)</i>	Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah defisit sebesar (Rp6.879.180.118.727) dan (Rp9.951.319.694.768). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</i>	E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
<i>Rp0</i>	Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp0.
<i>Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas</i>	E.4 Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas
<i>Rp(2.567.829.215.601)</i>	Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(2.567.829.215.601) dan Rp196.896.222.720.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i>	E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset
<i>Rp0</i>	Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai

persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp(457.008.883
)

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(457.008.883) dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	447,008,883
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	10,000,000
Jumlah	457,008,883

Koreksi Barang Persediaan Lainnya sebesar Rp10.000.000 dengan kronologi yaitu terdapat bongkaran bantalan kayu bekas jalan kereta api yang dicatat sebagai persediaan guna rencana hibah kepada pondok pesantren Syech Annawawi Tanara di Serang pada BTP Kelas I Jakarta.

Koreksi Suku Cadang sebesar Rp40.062.000.000 terdapat pada BTP Kelas I Semarang terdiri dari Rp27.192.000.000 merupakan pengurangan nilai dari NUP 1305 Jalan Kereta Api Bantalan Beton dan koreksi senilai Rp12.870.000.000 merupakan pengurangan nilai NUP 29 Instalasi Pengaman Lainnya akibat pengurangan nilai untuk pengadaan wesel persediaan yang sudah dimasukkan ke modul Persediaan.

Koreksi Suku Cadang sebesar Rp 40.529.008.883 terdapat pada Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan merupakan hasil koreksi tindak lanjut Berita Acara Koreksi Persediaan Nomor: PL.002/1/1/K1.2/DJKA/2025 dan Nomor: BA-BPKASS 20 Tahun 2025 sebagai data dukung utama untuk usulan jurnal koreksi pada Laporan Keuangan BPKA Sulsel TA.2024.

Koreksi Atas Reklasifikasi **E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi**
Rp14.574.383.458 Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp14.574.383.458 dan Rp4.996.134.704

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0 **E.4.4 Selisih Revaluasi Aset**
 Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Rp1.053.396.259.507) **E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**
 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp1.053.396.259.507) dan Rp166.435.404.030. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai (Rp1.340.188.951.582) dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi senilai Rp286.792.692.075.

Koreksi Lain-lain **E.4.6 Koreksi Lain-lain**
Rp(1.528.550.330.669) Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(1.528.550.330.669) dan Rp25.464.683.986. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	(5,778,550)
Koreksi Pendapatan	(1,158,849,782,058)
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	2,687,405,891,277
Jumlah	1,528,550,330,669

Transaksi Antar
Entitas
Rp4.753.344.26
6.592

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.753.344.266.592 dan Rp5.795.158.297.957. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.081.908.591.119)
Ditagikan ke Entitas Lain	5.796.129.627.082
Transfer Masuk	803.238.032.331
Transfer Keluar	(776.152.908.090)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	12.038.106.388
Jumlah	4.753.344.266.592

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024. DDEL sebesar Rp1.081.908.591.119 sedangkan DKEL sebesar Rp5.796.129.627.082

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp803.238.032.331 terdiri dari:

Jenis	Entitas	Nilai	Entitas Asal
Gedung dan Bangunan	Balai Perawatan	3.544.293.521	BTP Jakban
	BTP Jakban	19.859.251.703	BPTJ
Jalan dan Jembatan	Balai Perawatan	95.863.578.360	BTP Jakban
	BTP Jakban	6.068.979.013	BPTJ
Suku Cadang	BTP Jakban	56.808.221.152	Prasarana
	BTP Jateng	290.619.022.830	
	BTP Jatim	249.524.509.360	
	BTP Jabar	1.563.227.430	
	BTP Sumsel	79.468.219.242	
	Satker Sarana	790.008.500	
	BTP Jabar	24.720.000.000	BTP Jateng
Hasil Kajian/Penelitian	BTP Jatim	945.538.000	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Irigasi	Balai Perawatan	48.747.097.169	BTP Jakban
Jaringan	Balai Perawatan	59.848.805.771	BTP Jakban
	BTP Jakban	2.423.819.152	BPTJ
Peralatan dan Mesin	Balai Perawatan	111.195.034.718	BTP Jakban
	Satker Sarana	722.760.000	Balai Perawatan
	Balai Pengujian	7.900.603.608	Satker Sarana
	Satker Faskes	7.891.949.951	BTP Jatim
	Satker Faskes	1.215.290.000	Kantor Pusat DJKA
	Satker Lalin	846.220.000	Kantor Pusat DJKA
	Satker Sarana	1.101.750.000	Kantor Pusat DJKA
	Satker Prasarana	940.920.000	Kantor Pusat DJKA
	BTP Jakban	993.009.704	BPTJ
Ak. Peny. Jalan dan Jembatan	Balai Perawatan	(95.863.578.360)	BTP Jakban
	BTP Jakban	(1.213.795.804)	BPTJ
Ak. Peny. Peralatan dan Mesin	Balai Perawatan	(111.195.034.718)	BTP Jakban
	Balai Pengujian	(7.786.588.608)	Satker Sarana
	Satker Sarana	(722.760.000)	Balai Perawatan
	Satker Faskes	(7.026.822.559)	BTP Surabaya
	Satker Faskes	(164.793.392)	Kantor Pusat DJKA
	Sstker Lalin	(159.759.642)	Kantor Pusat DJKA
	Satker Sarana	(154.725.892)	Kantor Pusat DJKA
	Satker Prasarana	(167.597.142)	Kantor Pusat DJKA
	BTP Jakban	(128.971.807)	BPTJ
Ak. Peny. Gedung dan Bangunan	Balai Perawatan	(1.099.953.162)	BTP Jakban
	BTP Jakban	(795.976.764)	BPTJ
Ak. Peny. Irigasi	Balai Perawatan	(19.644.352.588)	BTP Jakban
Ak. Peny. Jaringan	Balai Perawatan	(24.118.175.459)	BTP Jakban
	Balai Jakban	(121.190.956)	BPTJ
Jumlah		803.238.032.331	

Rincian Transfer Masuk Tahun 2024 disajikan pada Lampiran.

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp776.152.908.090 terdiri dari:

Jenis	Entitas Ke	Nilai	Entitas
Gedung dan Bangunan	Balai Perawatan	3.544.293.521	BTP Jakban
Jalan dan Jembatan	Balai Perawatan	95.863.578.360	BTP Jakban
Suku Cadang	BTP Jakban	56.808.221.152	Prasarana
	BTP Jateng	290.619.022.830	
	BTP Jatim	249.524.509.360	
	BTP Jabar	1.563.227.430	
	BTP Sumsel	79.468.219.242	
	Satker Sarana	790.008.500	
	BTP Jabar	24.720.000.000	BTP Jateng
Hasil Kajian/Penelitian	BTP Jatim	945.538.000	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Irigasi	Balai Perawatan	48.747.097.169	BTP Jakban
Jaringan	Balai Perawatan	59.848.805.771	BTP Jakban
Peralatan dan Mesin	Balai Perawatan	111.195.034.718	BTP Jakban
	Satker Sarana	722.760.000	Balai Perawatan
	Balai Pengujian	7.900.603.608	Satker Sarana
	Satker Faskes	7.891.949.951	BTP Jatim
	Satker Faskes	1.215.290.000	Kantor Pusat DJKA
	Satker Lalin	846.220.000	Kantor Pusat DJKA
	Satker Sarana	1.101.750.000	Kantor Pusat DJKA
	Satker Prasarana	940.920.000	Kantor Pusat DJKA
Ak. Peny. Jalan dan Jembatan	Balai Perawatan	(95.863.578.360)	BTP Jakban
Ak. Peny. Peralatan dan Mesin	Balai Perawatan	(111.195.034.718)	BTP Jakban
	Balai Pengujian	(7.786.588.608)	Satker Sarana
	Satker Sarana	(722.760.000)	Balai Perawatan
	Satker Faskes	(7.026.822.559)	BTP Surabaya
	Satker Faskes	(164.793.392)	Kantor Pusat DJKA
	Satker Lalin	(159.759.642)	Kantor Pusat DJKA
	Satker Sarana	(154.725.892)	Kantor Pusat DJKA
	Satker Prasarana	(167.597.142)	Kantor Pusat DJKA
Ak. Peny. Gedung dan Bangunan	Balai Perawatan	(1.099.953.162)	BTP Jakban
Ak. Peny. Irigasi	Balai Perawatan	(19.644.352.588)	BTP Jakban
Ak. Peny. Jaringan	Balai Perawatan	(24.118.175.459)	BTP Jakban
Jumlah		776.152.908.090	

Rincian Penerimaan Transfer Keluar TA. 2024 disajikan pada Lampiran.

Adapun selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk senilai Rp27.085.124.241 disebabkan oleh transfer masuk pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar

Rp12.038.106.388.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2024 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	BTP Kelas I Bandung		Rp 12,038,106,388
Total Pengesahan			Rp 12,038,106,388
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp 12,038,106,388

Ekuitas Akhir

E.5 Ekuitas Akhir

Rp230.095.025.

572.555

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp230.095.025.572.555 dan Rp234.788.690.640.291

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA. 2024 telah disusun berdasarkan aplikasi SAKTI.
2. Dari hasil Audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Ditjen Perkeretaapian TA. 2023, Ditjen Perkeretaapian telah melakukan langkah lanjut sesuai usulan/rekomendasi BPK-RI.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 berupa Uang Muka dari KPPN, terdiri dari:

Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp0 yang berasal dari:

No	Uraian	31 Desember 2024
1	Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-
2	Satker Pengembangan Lalu Lintas & Peningkatan Angkutan Kereta Api	-
3	Satker Pengembangan Peningkatan & Perawatan Prasarana Perkeretaapian	-
4	Satker Pengembangan & Peningkatan Sarana Perkeretaapian	-
5	Satker Pengembangan & Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	-
6	BTP Kelas I Jakarta	-
7	BTP Kelas I Bandung	-
8	BTP Kelas I Semarang	-
9	BTP Kelas I Surabaya	-
10	BTP Kelas I Medan	-
11	BTP Kelas II Padang	-
12	BTP Kelas II Palembang	-
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	-
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	-
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	-
16	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	-
Jumlah		-

4. Utang kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2024 sebesar Rp944.802.855.444 terdiri dari:
 - a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp2.321.989.997 merupakan tagihan belanja barang TA. 2024 yang akan dibayarkan pada TA. 2025 terdapat pada:
 - 1) Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian sebesar Rp7.310.488

- 2) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebesar Rp2.253.086.690
 - 3) Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api senilai Rp6.934.158
 - 4) Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian senilai Rp4.596.081
 - 5) Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp32.432.765
 - 6) Balai Pengujian Perkeretaapian senilai Rp17.629.815
- b. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya senilai Rp941.366.851.926 terdapat pada:
- 1) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan senilai Rp44.143.568.365
 - 2) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai Rp635.144.026
 - 3) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya senilai Rp117.722.952.827
 - 4) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang senilai Rp4.283.825.034
 - 5) Balai Perawatan Perkeretaapian senilai Rp6.167.835.532
 - 6) Pengembangan Lalu Lintas Dan Peningkatan Angkutan Kereta Api senilai Rp19.202.854.685
 - 7) Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian senilai Rp9.661.283.095
 - 8) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung senilai Rp232.286.345.398
 - 9) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang senilai Rp155.789.599.718
 - 10) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta senilai Rp158.177.499.836
 - 11) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan senilai Rp55.203.020.677
 - 12) Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp14.295.863.655
 - 13) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang senilai Rp123.797.059.078
- c. Dana Pihak Ketiga senilai Rp1.114.013.521 terdapat pada:
- 1) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan senilai Rp908.758.521 berupa dana ganti kerugian pengadaan tanah dari anggaran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk relokasi fasum milik pemerintah daerah dalam rangka pembangunan jalur KA Makassar – Parepare
 - 2) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang senilai Rp205.255.000 berupa dana ganti kerugian pengadaan tanah dari anggaran Lembaga

Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pembangunan jalur KA akses Bandara YIA terutama pembayaran Tanah Kas Desa (TKD) dan Tanah Wakaf

5. Rincian Beban Persediaan senilai Rp15.591.563.446 pada Balai/Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

NO.	KANTOR/SATKER/BALAI	BEBAN PERSEDIAAN	NILAI
1	Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 584.117.607
2	Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 1.698.516.604
3	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 1.015.707.897
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 1.705.986.585
5	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 438.780.600
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 238.747.209
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 304.371.570
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 287.108.300
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 955.531.299
10	Balai Perawatan Perkeretaapian	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 675.271.689
11	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 277.392.552

12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 866.079.150
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 694.328.398
14	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 3.267.663.635
15	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 1.680.504.195
16	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 901.456.156

6. Kewajiban Pemerintah atas kekurangan pembayaran (*Backlog*) IMO Tahun 2023 kepada PT KAI

Dasar hukum pembayaran Biaya Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara atau *Infrastructure, Maintenance and Operation* (IMO) adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2024;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2023 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2023.

Tindak Lanjut Tagihan Backlog IMO 2023 adalah sebagai berikut:

- a. PT Kereta Api Indonesia telah menyampaikan realisasi biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) Tahun Anggaran 2023 diluar kontrak Nomor 02/KTR-SP4KA/IMO/2023 dan Nomor KL.701/XII/10/KA-2023 sebesar Rp3.294.304.355.589,00 (termasuk keuntungan dan PPN);

- b. Telah dilakukan proses pemeriksaan dan verifikasi data dukung atas realisasi biaya IMO Tahun Anggaran 2023 diluar kontrak Nomor 02/KTR-SP4KA/IMO/2023 dan Nomor KL.701/XII/10/KA-2023, nilai yang ditagihkan oleh PT KAI sebesar Rp3.294.304.355.589 (termasuk keuntungan dan PPN). Dan hasil nilai verifikasi sebesar Rp2.687.370.134.451 (termasuk keuntungan dan PPN);
- c. Berikut rincian usulan kekurangan pembayaran biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) TA. 2023:
- a. Biaya langsung

No	Kegiatan	Usulan KAI (Rp)	Hasil Pembahasan (Rp)
1	Pengoperasian	490.810.909.692	402.616.565.037
2	Pemeriksaan & Perawatan Jalur KA	869.466.276.738	730.251.921.123
3	Pemeriksaan & Perawatan Fasop KA	62.899.737.864	29.705.958.003
4	Perawatan Mengembalikan Fungsi Jalur KA	559.064.006.295	444.497.508.162
5	Perawatan Mengembalikan Fungsi Fasop KA	390.373.388.420	329.771.387.820
6	Perawatan Mengembalikan Fungsi Bangunan Stasiun	3.592.000.961	0
JUMLAH		2.376.206.319.970	1.936.843.340.145

- b. Total biaya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Biaya Langsung (BL)	1.936.843.340.145
2	Biaya Tidak Langsung (BTL, 15% dari BL)	290.526.501.022
3	Total Biaya (1+2)	2.227.369.841.167
4	Margin (10% dari BL)	193.684.334.015
5	Total Biaya + Margin (3+4)	2.421.054.175.181
6	PPN (11% dari Total Biaya+Margin)	266.315.959.270
7	Total Biaya + Margin + PPN (5+6)	2.687.370.134.451

- d. Telah disampaikan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: KU.204/1/6/DJKA/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penyampaian Data Dukung Final Reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Kegiatan Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) Tahun Anggaran 2023;
- e. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyampaikan Surat kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor:

PE.12.03/LHP-126/D103/2/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Hal Laporan Hasil Reviu atas Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) Tahun Anggaran 2023;

- f. Telah disampaikan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: UM.005/1/9/DJKA/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Hal Penyampaian Tindak Lanjut Penyelesaian Selisih Kekurangan Pembayaran Kegiatan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/ *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) Tahun Anggaran 2023;
- g. Terdapat surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: S-664/AG/AG.3/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Selisih Kekurangan Pembayaran Kegiatan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/ *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) Tahun Anggaran 2023, disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 pasal II, dalam hal pada Tahun Anggaran 2023, realisasi biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara melebihi nilai kontrak, penyelesaian kekurangan pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 22A.
- h. Berkenaan kewajiban kontijensi IMO di masa yg angka datang, bahwa dalam rangka penyelesaian tagihan atas biaya IMO yg melebihi kontrak, terdapat prosedur penyelesaian yg mengakibatkan adanya unsur ketidakpastian jumlah dan waktu pembayaran, sesuai dengan pengaturan pada Pasal 22A Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, adalah sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal realisasi biaya perawatan atas penugasan melebihi nilai kontrak dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian atau

dengan BUMN yang memperoleh penugasan Pemerintah dan biaya pengoperasian atas penugasan melebihi nilai kontrak, BUMN yang memperoleh penugasan Pemerintah dapat mengajukan usulan kekurangan pembayaran kepada Menteri Perhubungan;

- 2) Menteri Perhubungan melakukan evaluasi atas usulan kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud;
 - 3) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri Perhubungan menyampaikan permintaan reviu kepada kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
 - 4) Dalam hal hasil reviu badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional menyatakan terdapat kekurangan pembayaran atas penugasan Pemerintah, Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN untuk menyepakati tindak lanjut penyelesaian kekurangan pembayaran;
 - 5) Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud, Menteri Perhubungan mengusulkan penyelesaian kekurangan pembayaran tersebut kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Berdasarkan usulan penyelesaian kekurangan pembayaran tersebut, Menteri Keuangan melakukan penyelesaian kekurangan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 22A Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2024, Menteri Perhubungan telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan melalui Surat nomor KA.008/1/2/MHB/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Hal Tindak Lanjut Penyelesaian Selisih Kekurangan Pembayaran Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) Tahun Anggaran 2023;
 - j. Pada tanggal 9 Mei 2025, telah dilaksanakan High Level Meeting tiga menteri antara Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN sesuai dengan surat undangan Menteri Keuangan Nomor UND-3/MK/AG/2025 Tanggal 8 Mei 2025 untuk menyepakati penyelesaian kekurangan pembayaran IMO Tahun Anggaran 2023 kepada PT Kereta Api

Indonesia. Sebagai tindak lanjut High Level Meeting tersebut, menteri Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-321/MK.2/2025 Tanggal 9 Mei 2025 Hal Penetapan Cara Pembayaran Atas Penambahan Nilai Pekerjaan pada Perjanjian Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek dan Penyelesaian Selisih Kekurangan Pembayaran Kegiatan IMO Tahun 2023, dimana salah satu hal yang disampaikan dalam surat tersebut, untuk kekurangan pembayaran IMO Tahun 2023 sebesar Rp2.687.370.134.451,00 dipenuhi melalui DIPA Kementerian Perhubungan.

7. Nilai keseluruhan pencapaian pekerjaan pada Perjanjian Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek
 - a. Terdapat penambahan nilai keseluruhan pekerjaan pada Perjanjian Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek sebesar Rp27.422.138.469.717,40,- yang diajukan untuk direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan surat Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor KU.204/1/14/DJKA/2023 tanggal 17 Oktober 2023 hal Permohonan Reviu Data Dukung Nilai Pekerjaan Addendum 6 Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek, dan surat General Manager Departemen Perkeretaapian PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor 814/DPKA-IX/2023 tanggal 1 September 2023 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Addendum 6 Perjanjian Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek;
 - b. Berdasarkan hasil reviu BPKP nilai keseluruhan pekerjaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor Depok, dan Bekasi sebesar Rp25.502.558.027.450,20 dan telah dibayarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp23.310.373.268.439,80 Perubahan nilai Pembangunan telah dituangkan dalam Kontrak Addendum 6 Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk;
 - c. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 pada Pasal 7 ayat Pemerintah melakukan pembayaran atas pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk melalui pembayaran yang dialokasikan dalam Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan dan/atau pembayaran yang dilakukan Pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan cara pembayaran

atas pembangunan prasarana ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, sehingga atas penambahan nilai pekerjaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek sebesar Rp2.192.184.759.010,40 belum terdapat metode pembayaran;

- d. Telah disampaikan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: KU.201/1/7/DJKA/2024 tanggal 3 Juli 2024 perihal Permohonan Mekanisme Sumber Pembiayaan untuk Pembayaran atas Penambahan Nilai Pekerjaan pada Perjanjian Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek;
- e. Terdapat surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: S-232/AG/2024 tanggal 3 Oktober 2024 perihal Permintaan Usulan Mekanisme Sumber Pembiayaan Untuk Pembayaran Atas Penambahan Nilai Pekerjaan Pada Perjanjian Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek, disampaikan bahwa usulan tersebut agar dapat disampaikan dari Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-232/AG/2024 tanggal 3 Oktober 2024 perihal Permintaan Usulan Mekanisme Sumber Pembiayaan Untuk Pembayaran Atas Penambahan Nilai Pekerjaan Pada Perjanjian Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek, Menteri Perhubungan telah bersurat kepada Menteri Keuangan melalui Surat Nomor : KA/005/1/2/MHB/2025 Tanggal 21 Januari 2025 Hal Permohonan Mekanisme Sumber Pembiayaan untuk Pembayaran atas Penambahan Nilai Pekerjaan pada Perjanjian Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek, yang pada pokok surat nya memohon perkenan Menteri Keuangan untuk kebijakan penetapan mekanisme sumber pembiayaan untuk pembayaran atas penambahan nilai pekerjaan pada Perjanjian Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi;
- g. Pada tanggal 9 Mei 2025, telah dilaksanakan High Level Meeting tiga menteri antara Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN sesuai dengan surat undangan Menteri Keuangan Nomor UND-3/MK/AG/2025 Tanggal 8 Mei 2025 untuk menyepakati penyelesaian kekurangan pembayaran IMO Tahun Anggaran 2023 kepada PT Kereta Api Indonesia. Sebagai tindak

lanjut High Level Meeting tersebut, menteri Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-321/MK.2/2025 Tanggal 9 Mei 2025 Hal Penetapan Cara Pembayaran Atas Penambahan Nilai Pekerjaan pada Perjanjian Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek dan Penyelesaian Selisih Kekurangan Pembayaran Kegiatan IMO Tahun 2023, dimana salah satu hal yang disampaikan dalam surat tersebut, pembayaran atas penambahan nilai pekerjaan pada perjanjian pembangunan prasarana LRT Jabodebek yang dibangun oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Sebesar Rp2.192.184.759.010,40 dilakukan Pemerintah melalui PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

8. Terdapat rekening penampungan dana ganti kerugian pengadaan tanah dari anggaran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang dicatat dalam akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya, terdiri dari:

- a. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan untuk relokasi fasum milik pemerintah daerah dalam rangka pembangunan jalur KA Makassar – Parepare dengan rincian sebagai berikut:

No Rekening : 022301001488308

Nama Rekening : RPL 054 PS BPKA SULSEL UNTUK PEMBEBASAN LAHAN

Izin Pembukaan : S-2435/WPB.07/KP.01/2020 Tanggal 3 November 2020

Rekening

Saldo : Rp908.758.521

- b. Balai Perkeretaapian Kelas I Semarang untuk pembangunan jalur KA akses Bandara YIA terutama pembayaran Tanah Kas Desa (TKD) dan Tanah Wakaf dengan rincian sebagai berikut:

No Rekening : 015201001022303

Nama Rekening : RPL 134 BTP KELAS

Izin Pembukaan : S-2909/WPB.07/KP.01/2020 Tanggal 15 Desember 2020

Rekening

Saldo : Rp205.255.000

9. Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mencatat Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori pada Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) sesuai Amanah PP. 57 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Saat ini terdapat 2 permasalahan yang terjadi pada BMN ini. Satu seluruh sertifikat tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan Ruang Manfaat Jalan

(RUMAJA) dikuasai/dibawa oleh PT.Kereta Api Indonesia. Yang kedua PT.Kereta Api Indonesia mencatat aset Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) sejumlah 3.313 NUP. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Meminta Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Prof. Maria S.W Sumardjono Guru Besar Hukum Agraria dari Universitas Gajah Mada;
- b. Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomot B/1543/KSP.00/7076/03/2021 Pada tanggal 3 Maret 2021 berisi hasil rapat yang menyepakati bahwa seluruh pihak akan menggunakan PP 57 tahun 1990 sebagai dasar pencatatan aset;
- c. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN Pada Tanggal 27 Januari 2021 yang dihadiri oleh seluruh Kanwil dan Kantah BPN, Kanwil DJKN serta Balai Teknik Perkeretaapian tentang penegasan mengenai aset BMN DJKA :
 - 1) Bahwa RUMAJA dan RUMIJA adalah aset BMN;
 - 2) Melakukan Inventarisasi dan Overlay data tanah RUMAJA dan RUMIJA;
 - 3) Menunda proses penerbitan sertifikat dan pembatalan sertifikat pada tanah RUMAJA dan RUMIJA sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Pertemuan Koordinasi KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) dengan SESMEN BUMN tanggal 3 Juni 2021 dengan hasil Sesmen BUMN mendukung dan menyatakan bahwa RUMAJA dan RUMIJA merupakan aset BMN milik Kementerian Perhubungan;
- e. Menteri Perhubungan bersurat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dengan nomor PL.101/13/18 PHB 2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal Penundaan Proses Permohonan Pendaftaran Tanah yang belum Clear and Clean Sepanjang Jalur Perkeretaapian;
- f. Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan bersurat kepada Kementerian Perhubungan. Kementerian BUMN. BPKP dan PT.KAI (Persero) dengan nomor S-95/KN.2/2021 pada tanggal 22 Juli 2021 perihal Penyampaian Jadwal Rekonsiliasi Data dan Pemetaan RoW KA antara Kementerian Perhubungan dan PT.KAI (Persero);
- g. Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 25 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Kementerian Perhubungan. KPK RI. BPKP. Kementerian ATR/BPN. dan Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gajah Mada (Prof. Dr. Maria S.W.

Sumardjono. S.H.. M.C.L., M.P.A) disepakati bahwa perlunya MoU atau SKB Menteri untuk sebagai dasar yang akan digunakan para pihak.

- h. Surat Bersama Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Direktur Utama PT.KAI (Persero) kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PL.301/3/8/DJKA/2021 – KA.203/XI/2/KA-2021 perihal Inventarisasi dan Pengukuran.
- i. Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KU.001/4/13/DJKA/2022 perihal Penyampaian Hasil Inventarisasi dan Pengukuran Aset sepanjang jalur Perkeretaapian.
- j. Surat Plt.Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Nomor UM.006/8/4/DJKA/2022 Perihal permintaan Data Laporan Neraca Awal Perusahaan Umum Kereta Api tahun 1991 hasil dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1990 perihal Perubahan Perusahaan Jawatan Kereta Api menjadi Perusahaan Umum Kereta Api sebagai titik acuan untuk penyelesaian aset/prasarana pokok perkeretaapian

10.Perjanjian Konsesi Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Api Cepat Jakarta Bandung

Dalam rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Kementerian Perhubungan melaksanakan perjanjian konsesi dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) No. HK.201/1/21 Phb 2016 pada tanggal 16 Maret 2016. Adapun ruang lingkup perjanjian konsesi meliputi Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian, Sarana Perkeretaapian dan Fasilitas Penunjang Kereta Api Cepat meliputi Pembangunan, Pengoperasian, Perawatan dan Pengusahaan; Serah Terima Prasarana Perkeretaapian Kereta Api Cepat di akhir Masa Konsesi; serta Pengaturan penerbitan perizinan terkait pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian Kereta Cepat dengan nilai total konsesi sebesar USD 5.998.000.000,- selama 50 tahun sejak tanggal izin operasi prasarana/sarana perkeretaapian. Pendanaan dilakukan melalui penerbitan obligasi, pinjaman konsorsium, pendanaan lain yang memungkinkan. Penugasan diberikan kepada 4 BUMN berupa konsorsium yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; PT Kereta Api Indonesia (Persero); PT Jasa Marga (Persero) Tbk; dan PT Perkebunan Nusantara VII. Penyerahan Prasarana Perkeretaapian oleh KCIC kepada Kemenhub di akhir masa konsesi akan dilakukan dalam kondisi laik operasi dan tidak berada dalam penjaminan kepada pihak ketiga paling lambat

pada tanggal penyerahan. Adapun progres perizinan penyelenggaraan KCIC yang menjadi bagian tanggung jawab Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Trase Jalur KA Cepat Antara Jakarta dan Bandung Lintas Halim-Tegalluar;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 32 Tahun 2016 tentang Penetapan PT KCIC sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung;
- c. Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Konsesi/Perjanjian Kerjasama antara Kemenhub dengan PT KCIC Nomor: PJ 22 Tahun 2017; Nomor 10100/HK.02/2017 sebagai bagian dari perjanjian penyelenggaraan prasarana;
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 160 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana PT KCIC;
- e. Keputusan Dirjen Perkeretaapian Nomor: HK.601/SK.05/DJKA/3/16 tentang Pemberian Izin Pembangunan Prasarana PT KCIC;
- f. Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum yang efektif diterbitkan oleh Lembaga OSS pada 31 Desember 2019;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 114 Tahun 2023 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Cepat Indonesia-China;
- h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 119 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Kepada PT Kereta Cepat Indonesia China.

Saat ini penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung sudah dalam tahap operasional layanan sejak ditandatanganinya Berita Acara Tanggal Operasi Nomor : HK.201/1/1/DJKA/2023 dan 0704/BA-KSP/HPL/KCIC/10.2023 tanggal 17 Oktober 2023.

11. Konsesi Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

- a. Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Nomor Kontrak: HK.201/A.566/DJKA/12/17 dan Nomor Kontrak: KL.705/XII/10/KA-2017 tanggal 19 Desember 2017. Aset yang dikonsesikan berupa Aset Prasarana (Jalur LRT Jabodebek dan Fasilitas Pengoperasian), Peralatan Persinyalan, Aset Sarana, Aset Perawatan Prasarana, Aset Prasarana (17 Stasiun) dan Aset Depo. Konsesi

berlangsung selama 50 Tahun Sejak Izin Operasi Ditetapkan. Sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa nomor: PL.301/1/1/K1/DJKA/2023, aset konsesi jasa dicatat oleh BTP Kelas I Jakarta dengan nilai Aset Konsesi Jasa Dalam Pengerjaan sebesar Rp19.041.688.790.450. Terdapat Mutasi tambah senilai Rp7.415.263.688.416. merupakan Koreksi Perubahan Nilai Bertambah KDP Konsesi Jasa sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa nomor: PL.301/1/1/K1.2/DJKA/2024, Sehingga Nilai Aset Konsesi Jasa Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.456.952.478.866. Terdapat nilai mutasi kurang senilai Rp536.152.397.754 yang merupakan Koreksi Perubahan Nilai Berkurang KDP Konsesi Jasa sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa nomor: PL.301/1/5/K1.2/DJKA/2024, telah dilakukan reklasifikasi dari Aset Konsesi Jasa partisipan mitra dalam pengerjaan menjadi Aset Konsesi Jasa Partisipan Mitra sebesar Rp25.920.800.081.112, Terdapat Mutasi tambah senilai Rp89.294.400.873 merupakan Koreksi Perubahan Nilai Bertambah Aset Konsesi Jasa sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa tanggal 10 Februari 2025 sehingga Nilai Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.010.094.481.985 dan Nilai Aset Konsesi Jasa Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp121.938.239.219 yang dicatat pada BTP Kelas I Jakarta;

- b. Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Bandar Udara Soekarno Hatta Melalui Kota Tangerang oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Nomor Kontrak: HK.201/A.263/DJKA/7/14 dan Nomor Kontrak: HK.222/VII/2/KA-2014 tanggal 10 Juli 2014. Konsesi berlangsung selama 30 Tahun Sejak Izin Operasi Ditetapkan. Aset yang Dikonsesikan berupa Aset Prasarana (Tanah, Jalur, Fasilitas Operasi) Milik Mitra. Sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa nomor: PL.301/1/2/K1/DJKA/2023, aset konsesi jasa dicatat oleh BTP Kelas I Jakarta dengan nilai Aset Konsesi Jasa sebesar Rp2.414.560.953.619;
- c. Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Makassar – Parepare oleh PT. Celebes Railway Indonesia dengan Addendum Kontrak Pertama Nomor: HK.201/A.250/DJKA/IV/19 dan Nomor: 01/EXT/IV/CRI-DU/2019 tanggal 5 April 2019. Konsesi berlangsung selama 16 Tahun

Sejak Tanggal Operasi Komersial. Aset yang Dikonsesikan berupa Prasarana Perkeretaapian Umum Makassar - Parepare yang mencakup pembangunan Emplasemen Stasiun Pelabuhan Garongkong dan Prasarana Perkeretaapian Umum Segmen F, serta Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Segmen B, Segmen C, Segmen D Tahap I, Segmen D Tahap II dan Segmen F. D. Sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Nilai Aset Konsesi Jasa nomor: PL.301/5/16/K1.2/DJKA/2023, aset konsesi jasa dicatat oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dengan nilai Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp988.519.893.139;

- d. Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Kereta Cepat Jakarta – Bandung oleh PT. Kereta Cepat Indonesia China dengan Addendum Kontrak Kedua Nomor: PJ 22 TAHUN 2017 dan Nomor: 10100/HK.02/2017 tanggal Perjanjian: 4 Oktober 2017. Konsesi berlangsung selama Lama Masa Konsesi: 50 Tahun Sejak Izin Operasi Ditetapkan. Aset yang Dikonsesikan berupa Jalur Kereta Api Cepat, Fasilitas Pengoperasian Kereta Api Cepat, Stasiun dan Depo yang Dimiliki oleh Pihak Kedua. Agar bisa melakukan penghitungan aset konsesi jasa yang akan dicatat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersurat kepada PT. Kereta Cepat Indonesia China dengan Nomor Surat: PL.003/1/1/K1/DJKA/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal Data Dukung Pencatatan Aset Konsesi Jasa pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. PT. Kereta Cepat Indonesia China telah memberikan data-data keuangan yang dibutuhkan melalui Surat Nomor: 0026/HFF/HU/KCIC/02.2023 tanggal 6 Februari 2023 perihal Data Dukung Pencatatan Aset Konsesi Jasa pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Aset konsesi jasa dicatat oleh BTP Kelas I Bandung sebesar Rp 67.778.327.927.520. Terdapat Mutasi tambah senilai Rp6.251.946.044.421. merupakan Koreksi Perubahan Nilai Bertambah KDP Konsesi Jasa sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa nomor: PL.301/1/2/K1.2/DJKA/2024, sehingga Nilai Aset Konsesi Jasa Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp74.030.273.971.941. Hasil pembahasan dalam masa Audited Terdapat Mutasi tambah senilai Rp7.101.450.274.194. merupakan Koreksi Perubahan Nilai Bertambah KDP Konsesi Jasa sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Kasa nomor: PL.301/1/4/K1.2/DJKA/2024, sehingga nilai Aset Konsesi Jasa Dalam

Pengerjaan per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp81.131.724.246.135 yang kemudian dilakukan reklasifikasi dari Aset Konsesi Jasa Partisipan Mitra Dalam Pengerjaan menjadi Aset Konsesi Jasa Partisipan Mitra. Telah dilakukan pencatatan Aset Konsesi Jasa Partisipan Mitra berupa Tanah sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa nomor: PL.301/1/4/K1.2/DJKA/2024 sebesar Rp4.350.537.746.125. Sehingga nilai Aset Konsesi Jasa Partisipan Mitra per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp85.482.261.992.260.

12. Pengungkapan Piutang *Track Access Charge* (TAC)

Kronologi Pelaksanaan PNBP *Track Access Charge* (TAC) Tahun 2023 sebagai berikut;

a. Total Tagihan dan Denda PNBP *Track Access Charge* (TAC) periode Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2023 sebesar Rp3.051.542.095.259,82 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tagihan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) nilai pokok dan denda TW I, II, III, dan IV Tahun 2023 sebesar Rp2.788.426.016.989,02 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tagihan pokok Periode TW I sebesar Rp584.992.215.890,00
 - b) Tagihan pokok Periode TW II sebesar Rp630.036.685.309,00
 - c) Tagihan pokok Periode TW III sebesar Rp675.535.277.817,00
 - d) Tagihan pokok Periode TW IV sebesar Rp684.328.968.239,00
 - e) Denda Tagihan Periode TW I sebesar Rp70.199.065.906,80
 - f) Denda Tagihan Periode TW II sebesar Rp75.604.402.237,08
 - g) Denda Tagihan Periode TW III sebesar Rp54.042.822.225,36
 - h) Denda Tagihan Periode TW IV sebesar 13.686.579.364,78
- 2) Tagihan PT. Kereta Commuter Indonesia nilai pokok dan denda TW I, II, III, dan IV Tahun 2023 sebesar Rp257.147.224.479,94 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tagihan pokok Periode TW I sebesar Rp55.344.489.338,00
 - b) Tagihan pokok Periode TW II sebesar Rp59.507.488.658,00
 - c) Tagihan pokok Periode TW III sebesar Rp63.600.139.889,00
 - d) Tagihan pokok Periode TW IV sebesar Rp 63.393.900.402,00
 - e) Denda Tagihan Periode TW I sebesar Rp5.534.448.933,80
 - f) Denda Tagihan Periode TW II sebesar Rp5.950.748.865,80
 - g) Denda Tagihan Periode TW III sebesar Rp3.816.008.393,34

- 3) Tagihan PT. Railink nilai pokok dan denda TW I, II, III Tahun 2023 sebesar Rp39.81.468.705,54 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Tagihan pokok Periode TW I sebesar Rp939.474.294,00
 - b) Tagihan pokok Periode TW II sebesar Rp1.395.504.533,00
 - c) Tagihan pokok Periode TW III sebesar Rp1.431.070.169,00
 - d) Tagihan pokok Periode TW IV sebesar Rp1.772.668.355,00
 - e) Denda Tagihan Periode TW I sebesar Rp112.736.915,28
 - f) Denda Tagihan Periode TW II sebesar Rp167.460.543,96
 - g) Denda Tagihan Periode TW III sebesar Rp114.485.613,52
 - h) Denda Tagihan Periode TW IV sebesar Rp35.453.367,10
- b. Proses penyelesaian tagihan atas TAC tahun 2023 sampai dengan posisi saat ini adalah sebagai berikut.
- 1) Atas tagihan TAC PT. KAI Persero periode Triwulan I - IV Tahun 2023 dengan nilai total sebesar Rp2.788.426.016.989,02 (nilai pokok PNBPN sebesar Rp2.574.893.147.255,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp213.532.869.734,02), saat ini PT KAI telah mengajukan keringanan PNBPN TAC dalam bentuk pengurangan kepada Menteri Perhubungan melalui Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Nomor KF.203/IV/7/KA-2024, dengan rincian:
- a) Pengurangan Pokok PNBPN terutang sebesar Rp2.173.422.157.549,12, sehingga PT KAI dapat melakukan pembayaran TAC sebesar Rp401.470.989.705,88
 - b) Pengurangan denda keterlambatan PNBPN terutang sebesar Rp205.503.449.939,90 sehingga PT KAI dapat melakukan pembayaran denda keterlambatan pembayaran TAC sebesar Rp8.029.419.794,12

Atas permohonan keringanan tersebut, BPKP telah menerbitkan Laporan Kegiatan Pendampingan Nomor PE.12.03/LHP-65/D103/2/2024 tanggal 6 Mei 2024 atas Tindak Lanjut Permohonan Keringanan PNBPN TAC PT. KAI (Persero) Tahun 2023, yang dalam simpulannya menyatakan bahwa operasi penugasan KCJB, LRT, dan KA Bandara Soekarno Hatta kepada PT KAI mengalami kerugian. Selain kerugian operasi pada ketiga penugasan tersebut, PT KAI menerima kewajiban untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga atas pinjaman pembangunan KCJB, LRT Jabodetabek, dan KA Bandara Soekarno Hatta. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga tersebut

berlaku efektif setelah KCJB, LRT Jabodebek, serta KA Bandara Soekarno Hatta beroperasi sampai dengan selesainya masa pinjaman. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dalam rangka memperkuat kemampuan keuangan PT KAI, dapat dipertimbangkan untuk mengabulkan permohonan keringanan PNBPTAC PT KAI Tahun 2023 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kementerian Perhubungan telah menyampaikan surat nomor KU.102/1/6/MHB/2024 tanggal 30 Mei 2024 hal Permohonan pertimbangan keringanan PNBPTAC berupa Pengurangan kepada Menteri Keuangan terkait pengurangan Pokok dan sanksi administrative atas PNBPTerutang Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/ *Track Access Charge* (TAC) Tahun 2023. Kementerian Keuangan Melalui Surat nomor S-549/MK.02/2024 tanggal 4 Juli 2024 hal Persetujuan Permohonan Keringanan PNBPTAC Tahun 2023 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menyetujui pengurangan pokok sebesar Rp2.173.442.157.549,12 sehingga sisa kewajiban pokok PNBPTAC menjadi sebesar Rp401.470.989.705,88 dan pengurangan atas denda Rp213.532.869.734,02 tidak dapat disetujui. Berdasarkan hal tersebut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melalui surat Nomor KU.102/7/14/K2/DJKA/2024 tanggal 9 Juli 2024 hal Surat Tagihan PNBPTerutang Tahun 2023 dengan nilai kewajiban penyetoran PNBPT sebesar Rp639.092.118.822,25. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan pembayaran Tagihan PNBPTerutang Tahun 2023 sebesar Rp639.092.118.822,25 pada tanggal 16 Juli 2024 dengan kode NTPN 0E2987QLUP94RDL4;

- 2) Atas tagihan TAC PT. KCI periode Triwulan I - IV Tahun 2023 dengan nilai total sebesar Rp257.147.224.479,94 (nilai pokok PNBPT sebesar Rp241.846.018.287,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp15.301.206.192,94), PT KCI telah melaksanakan pembayaran pokok PNBPT sebesar Rp241.846.018.287,00, terbagi ke dalam dua kali pembayaran yaitu pembayaran pokok PNBPT Triwulan IV Tahun 2023 pada tanggal 7 Maret 2024 sebesar Rp63.393.900.402,00 (NTPN F788D2G4VPCGV9EA), dan pembayaran pokok PNBPT TW I s.d. III pada tanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp178.452.117.885,00 (NTPN C74F82G4VPESDA2P). Sedangkan untuk denda/sanksi

administrasinya, PT KCI telah mengajukan permohonan keringanan berupa pembebasan sanksi administrasi melalui Surat Direktur PT KCI Nomor 42/CV.200/CU/KCI/III/2024 tanggal 15 Maret 2024. Kementerian Perhubungan telah menyampaikan surat nomor KU.102/1/7/MHB/2024 tanggal 30 Mei 2024 hal Permohonan Persetujuan Pembebasan Sanksi Administratif PNBPTAC PT. KCI Tahun 2023. Kementerian Keuangan Melalui Surat nomor S-550/MK.02/2024 tanggal 4 Juli 2024 hal Penolakan atas usulan Keringanan PNBPTAC PT. Kereta Commuter Indonesia (PT.KCI) Tahun 2023, dari hasil penelaahan dan pertimbangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan permohonan keringanan yang dimaksud tidak dapat disetujui. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melalui surat Nomor KU.102/7/12/K2/DJKA/2024 tanggal 9 Juli 2024 hal Surat Tagihan PNBPTerutang Tahun 2023 dengan nilai sanksi administrasi penyetoran PNBPTerutang sebesar Rp15.301.206.192,94. PT. Kereta Commuter Indonesia (PT. KCI) telah melakukan pembayaran Tagihan PNBPTerutang Tahun 2023 sebesar Rp15.301.206.192,94 pada tanggal 16 Juli 2024 dengan kode NTPN 122D96U8EUMOE9NF;

- 3) Atas tagihan TAC PT. Railink periode Triwulan I - IV Tahun 2023 dengan nilai total sebesar Rp5.968.853.790,86 (nilai pokok PNBPTerutang sebesar Rp5.538.717.351,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp430.136.439,86), PT Railink telah menyetujui keseluruhan nominal tagihan yang meliputi pokok dan denda/sanksi administrasi, dan saat ini PT Railink telah mengajukan keringanan berupa pengangsuran pokok dan sanksi administrasi melalui surat Direktur PT Railink Nomor RL/DIR/413/IV/2024 tanggal 3 April 2024. Sebagai tindak lanjut atas permohonan tersebut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah memohon pertimbangan kepada Inspektorat Jenderal atas permohonan keringanan PNBPTAC tahun 2023 PT. Railink berupa pengangsuran melalui Surat Nomor KU.102/6/19/K2/DJKA/2024 tanggal 5 April 2024. Sesuai dengan Surat Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan nomor: PS.306/2/18/ITJEN/2024 tanggal 25 April 2025 PERIHAL Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi pertimbangan atas pengajuan keringanan PNBPTAC PT. Railink Tahun Anggaran 2023 , Surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api nomor

KU.102/6/22/K2/DJKA/2024 tanggal 29 April 2024 perihal Persetujuan Keinginan PNBPN dalam bentuk Pengangsuran serta ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api perihal Tagihan PNBPN Terutang Tahun 2023 kepada Direktur PT. Railink dengan nomor: KU.102/6/23/K2/DJKA/2024 tanggal 29 April 2024 sehingga pembayaran atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/*Track Access Charge* (TAC) PT. Railink Tahun 2023 berupa pengangsuran dengan rincian sebagai berikut:

No.	PNBP	Jumlah (Rp)	Jatuh tempo
1.	Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/Track Access Charge (TAC) PT. Railink Tahun 2023	1.193.770.758,18	7 Mei 2024
2.		1.193.770.758,17	11 Juni 2024
3.		1.193.770.758,17	11 Juli 2024
4.		1.193.770.758,17	13 Agustus 2024
5.		1.193.770.758,17	12 September 2024
Total		5.968.853.790,86	

PT. Railink sudah melakukan pembayaran sebagai berikut :

- a) Angsuran I sesuai sesuai surat Dirllaka nomor: KU.102/6/23/K2/DJKA/2024 tanggal 5 Juni 2024 dengan kode billing 820240429902773 sebesar Rp1.193.770.759 tanggal 29 April 2024 (NTPN 7256C6U8EUEE3QTL);
- b) Angsuran II sesuai surat Dirllaka nomor: KU.102/7/5/K2/DJKA/2024 tanggal 5 Juni 2024 dengan kode billing 820240605522863 sebesar Rp1.193.770.759 tanggal 10 Juni 2024 (NTPN 92F800NA041UOATF);
- c) Angsuran III sesuai surat Dirllaka nomor: KU.102/7/9/K2/DJKA/2024 tanggal 4 Juli 2024 dengan kode billing 820240705688462 sebesar Rp1.193.770.759 tanggal 11 Juli 2024 (NTPN D06920NA04LU94SE);
- d) Angsuran IV sesuai surat Dirllaka nomor: KU.102/7/16/K2/DJKA/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dengan kode billing 820240813780477 sebesar Rp1.193.770.759 tanggal 14 Agustus 2024 (NTPN A6F5F7QLUPC8JRFT);
- e) Angsuran V sesuai surat Dirllaka nomor: KU.102/7/21/K2/DJKA/2024 tanggal 9 September 2024 dengan kode billing 820240910588837 sebesar Rp1.193.770.759 tanggal 12 September 2024 (NTPN 7CB1E55DF9NVN6T5).

Kronologi Pelaksanaan PNB*P Track Access Charge* (TAC) Tahun 2024 sebagai berikut;

- a. Saat ini masih dalam proses Permohonan Persetujuan Menhub atas Besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp) untuk Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ *Track Access Charge* (TAC) (Penelaahan/Penelitian Data Dukung oleh Biro, yang selanjutnya apabila lengkap akan diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan Persetujuan sesuai amanat PMK 20 Tahun 2024 pasal 2 ayat (7);
- b. Proses Penyusunan Draft perubahan PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis PNB*P* Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen). Kebijakan terkait pengurangan PNB*P* TAC hanya berlaku untuk PT.KAI selaku Wajib Bayar yang mendapat penugasan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2015;
- c. Kementerian Perhubungan sudah menyampaikan Surat kepada Kementerian Keuangan tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor PR.005/1/12/MHB 2024 perihal Permohonan Persetujuan Nilai SBPP KA dan FP untuk Perhitungan PNB*P* TAC;
- d. Kementerian Keuangan sudah menyampaikan Surat kepada Kementerian Perhubungan tanggal 19 Agustus 2024 dengan Nomor: S-740/MK.02/2024 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan atas Besaran SBPP KA dan FP untuk Perhitungan PNB*P* TAC yang berisi Permohonan persetujuan besaran SBPP KA dan FP untuk perhitungan PNB*P* TAC belum dapat disetujui dengan Alasan belum disetujui karena belum terdapat skenario perhitungan tarif PNB*P* TAC sampai dengan Rp0 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen);
- e. Direktur Jenderal Perkeretaapian menyampaikan Surat kepada Menteri Perhubungan pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan Nomor UM.006/4/6/DJKA/2024 perihal Laporan Kajian Analisa Pelaksanaan Formula Baru Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian berisi laporkan hasil kajian yang sedang dilaksanakan oleh DJKA, yang salah satu poin hasil kajiannya adalah rekomendasi pengenaan PNB*P* TAC

- husus untuk PT KAI (Persero) sampai dengan Rp0 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada rencana perubahan PM 92 Tahun 2021;
- f. Tanggal 7 Oktober 2024 dilaksanakan Rapat Pembahasan Pengaturan Tarif PNBP TAC sampai dengan Rp0 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen). Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat dihadiri oleh perwakilan Kemenkeu, Kemenhub, Kemen BUMN, BPKP, dan PT KAI (Persero).
- Hasil rapat pembahasan sebagai berikut:
1. Kemenhub cq. DJKA perlu menyampaikan dokumen kajian yang telah dilaksanakan kepada Kemenko Perekonomian, Kemen BUMN, dan PT. KAI (Persero) untuk diberi tanggapan dan masukan;
 2. PT KAI (Persero) perlu menyampaikan usulan pengaturan PNBP TAC termasuk skenario pengenaan sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) beserta dengan data dukung dan kajian;
- g. Menindaklanjuti usulan pertama yang belum disetujui oleh Kemenkeu, telah disampaikan Surat Dirjen KA kepada Sekjen Kemenhub Nomor: KU.102/1/21/DJKA/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Penyampaian Usulan Nilai Satuan Biaya Penggunaan Prasarana KA dan Faktor Prioritas Untuk Perhitungan PNBP TAC;
- h. Paralel dengan panyampaian usulan kembali pada poin (g), Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.12.02/S739/D1/03/2024 perihal *Reviu Update* Komponen Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara / *Track Access Charge* (TAC), Tanggal 12 November – 6 Desember 2024 BPKP melaksanakan reviu terhadap update besaran komponen perhitungan PNBP TAC yaitu Satuan Biaya Penggunaan Prasarana KA (SBPP KA) dan Faktor Prioritas Penggunaan Prasarana (FP);
- i. Telah disampaikan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Menteri Perhubungan tanggal 11 Desember 2024 dengan Nomor KU.102/1/23/DJKA/2024 perihal Penjelasan atas Konsep Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan perihal Permohonan Persetujuan Nilai SBBP KA dan FP untuk Perhitungan PNBP TAC serta Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0 atau 0%;
- j. Deputi Kepala BPKP tanggal 13 Desember 2024 menyampaikan surat dengan Nomor PE.12.03/SP839/D1/03/2024 perihal Laporan Hasil Reviu

atas Update Komponen Perhitungan PNBP TAC. Hasil Review BPKP menyimpulkan bahwa perhitungan komponen SBPP KA yang diusulkan oleh DJKA sebesar Rp34,01/GTKM telah mencerminkan penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara dan telah sesuai dengan peraturan perundangan;

- k. Menteri Perhubungan menyampaikan Surat kepada Menteri Keuangan tanggal 23 Desember 2024 dengan Nomor: KA.005/1/16/MHB/2024 perihal Permohonan Persetujuan Nilai SBPP KA dan FP Untuk Perhitungan PNBP TAC. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan oleh DJKA dan hasil review BPKP, Kemenhub menyampaikan kembali usulan nilai SBPP KA dan FP untuk perhitungan PNBP TAC Tahun 2024;
- l. Menteri Keuangan menyampaikan Surat kepada Menteri Perhubungan tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor S-1218/MK.02/2024 perihal Persetujuan atas Besaran SBPP KA dan FP untuk Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ *Track Access Charge* (TAC). Menteri Keuangan menyetujui besaran nilai SBPP KA dan FP yang telah mendapatkan reviu dari BPKP sesuai usulan yang disampaikan Kementerian Perhubungan dan perlu segera menetapkan besaran SBPP KA dan FP, untuk selanjutnya menyampaikan kepada Wajib Bayar dalam rangka penghitungan kewajiban PNBP TAC secara mandiri;
- m. Menindaklanjuti persetujuan dari Kementerian Keuangan, Menteri Perhubungan telah menetapkan Besaran SBPP KA dan FP pada perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 179 Tahun 2024 Tentang Penetapan Besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana dan Besaran Faktor Prioritas Pada Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

Tindak Lanjut Penyetoran atas PNBP Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara / *Track Access Charge* (TAC) di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 - 1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan penyetoran PNBP TAC Tahun 2024 sebesar Rp. 372.657.205.025,- (NTPN : 950710NA0DHGETDS) pada tanggal 20 Februari 2025 sebagaimana surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor:

KF.304/II/21/KA-2025 tanggal 20 Februari 2025 perihal “Penyampaian Laporan Realisasi PNBP TAC PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2024”;

- 2) Tanggal 3 Maret 2025 telah dilaksanakan Verifikasi Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara / *Track Access Charge* (TAC) Semester I dan II Tahun 2024 PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dihadiri Perwakilan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - 3) Untuk menindaklanjuti hasil verifikasi, telah disampaikan surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KU.102/1/8/K2/DJKA/2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal “Tagihan Pertama atas Kekurangan Penyetoran PNBP TAC Tahun 2024”;
 - 4) Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menyampaikan surat Nomor: KF.203/III/11/KA-2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal “Permohonan Keringanan Pokok PNBP TAC PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2024”;
 - 5) Telah disampaikan surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api kepada Inspektur II Kementerian Perhubungan Nomor: KU.102/1/17/K2/DJKA/2025 tanggal 24 April 2025 perihal “Permohonan Pertimbangan atas Permohonan Keringanan PNBP TAC Tahun 2024 PT Kereta Api Indonesia (Persero) berupa Pengurangan”;
 - 6) Inspektur II Kementerian Perhubungan telah menyampaikan surat kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor: PS.306/2/8/ITJEN/2025 tanggal 29 April 2025 perihal “Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Pertimbangan atas Permohonan Keringanan PNBP TAC PT KAI (Persero) berupa Pengurangan TA 2024”;
 - 7) Posisi saat ini masih dalam tahap tindak lanjut atas permohonan keringanan yang telah disampaikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- b. PT Kereta Commuter Indonesia
- 1) PT Kereta Commuter Indonesia telah melaksanakan *self assessment* dan penyetoran PNBP TAC Tahun 2024 sebesar Rp157.021.418.075,- pada tanggal 30 Januari 2025, yang terdiri dari dua kali setoran yaitu sebesar Rp79.312.548.427,-

- (NTPN : FB0BC3CIFT5VTLUA) dan Rp77.708.869.648,- (NTPN 01D660NA0DEQP0A3) sebagaimana surat Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: 71/CV.202/CU/KCI/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 perihal “Penyampaian Perhitungan Sendiri (*Self Assessment*) dan Bukti Setor PNBP TAC Tahun 2024”;
- 2) Tanggal 7 dan 18 Februari 2025 telah dilaksanakan Verifikasi Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara / *Track Access Charge* (TAC) Semester I dan II Tahun 2024 PT Kereta Commuter Indonesia yang dihadiri Perwakilan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Commuter Indonesia serta telah ditandatangani Berita Acara;
 - 3) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara / *Track Access Charge* (TAC) Semester I dan II Tahun 2024 PT Kereta Commuter Indonesia ditemukenali bahwa masih terdapat kekurangan penyetoran kewajiban PNBP TAC Tahun 2024 PT Kereta Commuter Indonesia sebesar Rp. 32.586.229,-;
 - 4) Menindaklanjuti kekurangan penyetoran PT Kereta Commuter Indonesia tersebut, telah disampaikan surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api kepada Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: KU.102/1/5/K2/DJKA/2025 tanggal 20 Februari 2025 perihal “Tagihan Pertama atas Kekurangan Penyetoran PNBP TAC Tahun 2024”;
 - 5) PT Kereta Commuter Indonesia telah melaksanakan penyetoran atas kekurangan PNBP TAC Tahun 2024 sebesar Rp. 33.237.954,- (NTPN 893413CIFT8MQDFH) dengan rincian kekurangan Self Asement sebesar Rp32.586.229,- dan denda sebesar Rp651.725,- pada tanggal 24 Februari 2025 sebagaimana surat Plt. Direktur Keuangan PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: 001/CV.203/CA/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 perihal “Penyampaian Bukti Bayar Atas Kekurangan Penyetoran PNBP TAC Tahun 2024”;
 - 6) Posisi saat ini, PT Kereta Commuter Indonesia telah melaksanakan kewajiban penyetoran PNBP Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara / *Track Access Charge* (TAC) Tahun 2024.

c. PT Railink

- 1) PT Railink telah menyampaikan *self assessment* PNBP TAC Tahun 2024 sebesar
Rp. 4.767.106.539,- melalui surat Direktur Utama Nomor: RL/DIR/075/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal “*Self Assessment* GTKM dan *Track Access Charge* (TAC) PT Railink Tahun 2024”;
- 2) Terhadap hasil *self assessment*, PT Railink menyampaikan Permohonan Keringanan untuk melakukan Pengangsuran selama 3 kali melalui surat Direktur Utama Nomor: RL/DIR/080/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal “Permohonan Keringanan PNBP TAC Tahun 2024 PT Railink”;
- 3) PT Railink telah melakukan penyetoran Angsuran Pertama sebesar Rp. 1.589.035.513,- (NTPN C1E1B0NA0DH22SK0) pada Tanggal 7 Februari 2025 sebagaimana surat Direktur Utama Nomor: RL/DIR/113/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal “Permohonan Pengangsuran & Penyampaian Bukti Setor Cicilan I Tagihan TAC Tahun 2024 PT Railink”;
- 4) Tanggal 18 Februari 2025 telah dilaksanakan Verifikasi Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara / *Track Access Charge* (TAC) Semester I dan II Tahun 2024 PT Railink yang dihadiri Perwakilan Kementerian Perhubungan dan PT Railink serta telah ditandatangani Berita Acara;
- 5) Guna menindaklanjuti hasil verifikasi dan hasil pembahasan tindak lanjut permohonan keringanan PT Railink, telah disampaikan surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api kepada Direktur Utama PT Railink Nomor: KU.102/1/7/K2/DJKA/2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal "Persetujuan Keringanan PNBP dalam bentuk Pengangsuran";
- 6) PT Railink telah melakukan penyetoran Angsuran Kedua, Denda Keterlambatan Setoran Angsuran Pertama, dan Kekurangan *Self Assessment* PNBP TAC Tahun 2024 dengan total sebesar Rp. 1.621.686.594,- (NTPN : 5660655DFIG3TUSG) pada Tanggal 17 Maret 2025 dengan rincian Angsuran ke II sebesar Rp. 1.589.035.513,-, Kekurangan nilai *Self Assessment* sebesar Rp 870.370,-, dan Denda Keterlambatan Tagihan TAC Tahun 2024 sebesar Rp31.780.711,- sebagaimana surat Direktur Utama PT Railink Nomor:

RL/DIR/254/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal “Penyampaian Bukti Setor Cicilan II Beserta Kekurangan Nilai *Self Assessment* & Denda Keterlambatan Tagihan TAC Tahun 2024 PT Railink” ;

- 7) PT Railink telah melakukan penyetoran Angsuran Ketiga sebesar Rp. 1.589.035.513,- (NTPN : EF4097QLV2AIVIB5) pada Tanggal 28 April 2025 sebagaimana surat Direktur Utama Nomor: RL/DIR/377/IV/2025 tanggal 28 April 2025 perihal “Penyampaian Bukti Setor Cicilan III Beserta Kekurangan Nilai *Self Assessment* dan Denda Keterlambatan Tagihan TAC Tahun 2024 PT Railink”;
- 8) Posisi saat ini, PT Railink telah melaksanakan seluruh kewajiban penyetoran PNPB Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/ *Track Access Charge* (TAC) Tahun 2024.

13. Biaya Bunga Pasca Tanggal Operasi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Jabodebek

Terdapat pending matters terkait biaya bunga setelah tanggal operasi komersial (TOK) penyelenggaraan kereta api ringan Jabodebek (LRT Jabodebek). Berdasarkan hasil perhitungan atas nilai biaya bunga pasca tanggal operasi sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat biaya bunga sebesar Rp317.623.530.046,00 yang belum disepakati metode pembiayaannya.

Terdapat dua opsi terkait metode pembiayaan atas bunga yang timbul pasca Tanggal Operasi Komersial (TOK), pemilihan metode pembiayaan akan berdampak terhadap siapa pihak yang akan menanggung kewajiban pembayaran atas bunga tersebut, sebagai berikut :

- a. Biaya bunga dikapitalisasi sebagai *Interest During Construction* (IDC), sehingga dikapitalisasi ke aset konsesi penyelenggaraan kereta api ringan (*Light Rail Transit*) Jabodebek. Hal tersebut berdampak pada pembebanan biaya bunga sebagai aset konsesi hak pengoperasian aset prasarana pada neraca PT KAI, dan pembiayaan atas bunga tersebut akan sama dengan skema pembiayaan selama proses konstruksi, yaitu melalui pinjaman dan/atau ekuitas (PMN).
- b. Biaya bunga tidak dikapitalisasi sebagai *Interest During Construction* (IDC) dan dibiayakan sebagai biaya bunga dan masuk kedalam komponen beban operasional. Hal tersebut berdampak pada pembebanan biaya bunga sebagai beban operasional pada laporan laba/rugi PT KAI, dan

pembiayaan atas bunga tersebut akan mengikuti skema sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.02/2022 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, dimana biaya bunga akan masuk ke dalam beban operasional yang penggantiannya akan melalui skema subsidi *Public Service Obligation* (PSO).

Atas penerapan kedua metode tersebut, keduanya akan berdampak pada Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dari sisi pencatatan nilai aset konsesi jasa partisipasi mitra pada Ditjen Perkeretaapian. Jika nilai biaya bunga tersebut dikapitalisasi sebagai IDC, maka Kementerian Perhubungan juga harus memperlakukan biaya bunga tersebut sebagai IDC dan dicatat/dikapitalisasi ke aset konsesi jasa. Sedangkan jika biaya bunga tersebut tidak dikapitalisasi ke dalam aset konsesi, maka biaya bunga tersebut tidak dicatat/dikapitalisasi ke aset konsesi jasa.

14. Kendala Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian

- a. Tertundanya kontrak pekerjaan termasuk pekerjaan *Infrastructure Maintenance and Operation* berkontrak dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dikarenakan :
 - 1) Pelaksanaan Tender yang tidak sesuai rencana;
 - 2) Kesiapan *readiness criteria* aspek administrasi dan teknis;
 - 3) Keterlambatan progres ketersediaan Lahan.
- b. Sisa Anggaran Rupiah Murni Tahun Anggaran 2024 antara lain:
 - 1) Perhitungan sisa kontrak pekerjaan *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) 2024;
 - 2) Pekerjaan tidak dilaksanakan;
 - 3) Sisa Pagu atas kontrak pekerjaan kontraktual/swakelola lain.
- c. Sisa Anggaran SBSN dikarenakan :
 - 1) Waktu konstruksi tidak mencukupi sesuai dengan *review Detail Engineering Design* (DED);
 - 2) Pengulangan tender berakibat penambahan waktu;
 - 3) Pengadaan lahan dilakukan secara paralel dengan pekerjaan fisik dan terhambat;

- 4) *Reviu Detail Engineering Design* (DED) akibat perubahan desain dilapangan;
- 5) Keterbatasan waktu pekerjaan dengan lingkup *import* barang/ material dari Luar Negeri;
- 6) Selisih Pagu dan Kontrak untuk pekerjaan telah selesai.

IKHTISAR

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia nomor PER-67/PB/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahunan dilampiri Ringkasan Laporan Keuangan BLU dan Lembar Muka (*Face*) Laporan Keuangan seluruh satker BLU yang berada di lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi Laporan Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan PMK 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, serta PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) ini disusun dari laporan keuangan 2 (dua) satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditetapkan menjadi satker BLU pada tahun 2019 yaitu Satker BLU Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, kemudian yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu Satker BLU Balai Pengujian Perkeretaapian.

1. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU.

Total Pendapatan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 402.904.513.963,- dan Rp 402.673.136.526,-. Pendapatan per 31 Desember 2024 terdiri dari Pendapatan Alokasi APBN senilai Rp 308.399.828.176,-, Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat Rp 89.552.593.242,-, Pendapatan Hasil Kerjasama BLU senilai Rp 2.588.076.542,-, Pendapatan BLU Lainnya Rp 2.101.499.320,- serta Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp 262.516.683,-.

Total Beban 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 1.062.169.340.673,- dan Rp 1.029.469.503.622,-. Beban per 31 Desember 2024 terdiri dari Beban Operasional senilai Rp 1.061.106.952.052,-, serta Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp 1.062.388.621,-. Ringkasan Laporan Operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU Tahun Anggaran 2024 (Audited)
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

LAPORAN OPERASIONAL				
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN				
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN				
31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)				
URAIAN			31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
(1)				
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Alokasi APBN			308.399.828.176	318.608.903.625
Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat			89.552.593.242	77.553.508.725
Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Lain			-	-
Pendapatan Hibah BLU			-	-
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU			2.588.076.542	4.659.762.848
Pendapatan BLU Lainnya			2.101.499.320	259.330.444
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL			402.641.997.280	401.081.505.642
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai			16.930.826.216	12.840.623.846
Beban Persediaan			971.720.950	1.481.158.889
Beban Barang dan Jasa			225.512.255.700	243.941.043.408
Beban Pemeliharaan			63.660.058.161	25.150.082.961
Beban Perjalanan Dinas			26.995.215.473	23.836.594.757
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat			-	-
Beban Bunga			-	-
Beban Subsidi			-	-
Beban Hibah			-	-
Beban Bantuan Sosial			-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi			727.019.304.419	720.622.590.327
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			17.571.133	5.778.550
Beban Transfer			-	-
Beban Lain-Lain			-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL			1.061.106.952.052	1.027.877.872.738
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			(658.464.954.772)	(626.796.367.096)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			-	15.002.345
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			-	15.002.345
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			(799.871.938)	7.496.875
OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			262.516.683	1.591.630.884
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			1.062.388.621	1.584.134.009
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			(799.871.938)	22.499.220
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa			-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA			-	-
SURPLUS / (DEFISIT) - LO			(659.264.826.710)	(626.773.867.876)

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Kementerian/Lembaga mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2024. Jumlah Aset per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (*Audited*) senilai Rp 8.120.193.035.724,- dan Rp 8.760.392.134.833,- yang terdiri dari Aset Lancar senilai Rp 55.574.443.925,- dan Rp 30.224.256.326,- Aset Tetap senilai Rp 8.010.668.560.948,- dan Rp 8.704.986.654.739,- dan Aset Lainnya senilai Rp 53.950.030.851,- dan Rp 25.181.223.768,-.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah senilai Rp 46.604.534.021,- dan Rp 25.925.700.526,- yang terdiri dari Kewajiban Lancar senilai Rp 46.604.534.021,- dan Rp 25.925.700.526,-. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah senilai Rp 8.073.588.501.703,- dan Rp 8.734.466.434.307,-. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (*Audited*) dapat disajikan sebagai berikut:

NERACA		
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN		
PER 31 DESEMBER 2024 (<i>AUDITED</i>) DAN 31 DESEMBER 2023 (<i>AUDITED</i>)		
NAMA PERKIRAAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (<i>AUDITED</i>) (Rp)
1		
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Kas pada Badan Layanan Umum	47.016.600.556	29.071.510.471
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	5.000.000.000	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	60.610.602	-
Piutang Bukan Pajak	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	-	-
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	3.513.874.700	1.155.710.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(17.569.373)	(5.778.550)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	3.496.305.327	1.149.931.450
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	352.000	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(1.760)	-
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	350.240	-
Persediaan	577.200	2.814.405
Persediaan yang Belum Diregister	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	55.574.443.925	30.224.256.326

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU Tahun Anggaran 2024 (Audited)
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

NERACA		
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN		
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)		
NAMA PERKIRAAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (AUDITED) (Rp)
1		
ASET		
ASET TETAP		
Tanah	61.539.072.900	61.539.072.900
Tanah Belum Diregister	-	-
Peralatan dan Mesin	637.206.030.732	601.195.271.225
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-
Gedung dan Bangunan	2.004.823.619.511	1.999.030.937.976
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	-	-
Jalan Irigasi dan Jaringan	7.917.028.363.982	7.917.028.363.982
Jalan Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	-	-
Aset Tetap Lainnya	339.934.696.300	339.934.696.300
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.317.069.500	1.317.069.500
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2.951.180.291.977)	(2.215.058.757.144)
Aset Tetap yang Belum Diregister	-	-
JUMLAH ASET TETAP	8.010.668.560.948	8.704.986.654.739
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	5.856.422.245	5.856.422.245
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
Aset Lain-lain	1.401.186.000	1.401.186.000
Aset Lainnya yang Belum Diregister	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	49.405.490.112	20.255.123.392
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2.713.067.506)	(2.331.507.869)
JUMLAH ASET LAINNYA	53.950.030.851	25.181.223.768
JUMLAH ASET	8.120.193.035.724	8.760.392.134.833
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga	46.414.284.870	24.668.682.751
Utang yang Belum Ditagihkan	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	190.249.151	1.257.017.775
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Uang Muka dari KPPN	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	46.604.534.021	25.925.700.526
JUMLAH KEWAJIBAN	46.604.534.021	25.925.700.526
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	8.073.588.501.703	8.734.466.434.307
JUMLAH EKUITAS	8.073.588.501.703	8.734.466.434.307
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.120.193.035.724	8.760.392.134.833

3. LAPORAN ARUS KAS

- a. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- b. Informasi dalam arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai :
 - i. Kemampuan BLU dalam menghasilkan kas dan setara kas;
 - ii. Sumber dana BLU;
 - iii. Penggunaan BLU;
 - iv. Prediksi kemampuan BLU untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang.
- c. Laporan Arus Kas BLU di Lingkungan DJKA dapat disajikan sebagai berikut:

LAPORAN ARUS KAS - BLU DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)		
URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Pendapatan dari Alokasi APBN	308.399.828.176	318.608.903.625
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada	87.194.428.542	77.205.039.725
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas	-	-
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	1.492.165.100	2.179.458.220
Pendapatan dari Hibah	-	-
Pendapatan Usaha Lainnya	2.069.679.536	260.330.444
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	-	22.499.220
Pendapatan PNBPN Umum	1.062.388.621	1.569.131.664
JUMLAH ARUS MASUK KAS	400.218.489.975	399.845.362.898
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pegawai	(17.105.303.256)	(13.142.616.098)
Pembayaran Barang	(110.731.420.215)	(117.498.790.176)
Pembayaran Jasa	(111.923.513.396)	(120.582.937.839)
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(969.483.745)	(1.483.343.094)
Pembayaran Pemeliharaan	(64.812.101.604)	(25.194.247.013)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(26.995.215.473)	(23.836.294.757)
Pembayaran Barang dan Jasa kekhususan BLU	(6.023.689.940)	(6.667.841.020)
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU	-	-
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	(1.062.388.621)	(1.584.134.009)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	(339.623.116.250)	(309.990.204.006)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	60.595.373.725	89.855.158.892

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU Tahun Anggaran 2024 (Audited)
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

LAPORAN ARUS KAS - BLU		
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN		
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN		
31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)		
URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS MASUK KAS		
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset lainnya	-	15.002.345
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari	-	-
JUMLAH ARUS MASUK KAS	-	-
ARUS KELUAR KAS		
Perolehan atas Tanah	-	-
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(36.682.486.400)	(76.211.824.072)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(839.135.359)	(790.048.298)
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	(128.661.881)	-
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset lainnya	-	-
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	(37.650.283.640)	(77.001.872.370)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(37.650.283.640)	(77.001.872.370)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	-	-
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	-	-
JUMLAH ARUS MASUK KAS	-	-
ARUS KELUAR KAS		
Penyetoran ke Kas Negara	-	-
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
JUMLAH ARUS MASUK KAS	-	-
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	-	-
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	22.945.090.085	12.868.288.867
Penyesuaian atas Selisih Kurs	-	-
Koreksi Saldo Kas	-	-
Saldo Awal Kas	29.071.510.471	16.203.221.604
Koreksi Saldo Awal	-	-
SALDO AKHIR KAS	52.016.600.556	29.071.510.471
Rincian Saldo Akhir Kas Antara Lain :		
Saldo Akhir Kas pada BLU	-	-
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek BLU	-	-
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	-	-
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	-	-
Jumlah Rincian Saldo	52.016.600.556	29.071.510.471
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :		
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas bertujuan untuk menyajikan informasi perubahan (kenaikan/penurunan) ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah LPE DJKA untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN		
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN		
31 DESEMBER 2024 (<i>AUDITED</i>) DAN 31 DESEMBER 2023 (<i>AUDITED</i>)		
URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
EKUITAS AWAL	8.734.466.434.307	9.361.280.714.308
SURPLUS / DEFISIT - LO	(659.264.826.710)	(626.773.867.876)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI	(1.727.120.894)	(40.412.125)
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI /KESALAHAN MENDASAR		
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1.732.899.444)	(40.413.625)
koreksi lain-lain	5.778.550	1.500
TRANSAKSI ANTARA ENTITAS	114.015.000	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(660.877.932.604)	(626.814.280.001)
EKUITAS AKHIR	8.073.588.501.703	8.734.466.434.307

5. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL terdiri atas SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir. Berikut ini adalah LPSAL DJKA untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023:

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)		
URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	29.071.510.471	16.203.221.604
PENGUNAAN SAL	-	-
Sub Total	29.071.510.471	16.203.221.604
SISA KURANG/KURANG PEMBAYARAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(284.392.349.470)	(304.156.480.749)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	-	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	307.337.439.555	317.024.769.616
Pendapatan Alokasi APBN	308.399.828.176	318.608.903.625
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(1.062.388.621)	(1.584.134.009)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	-	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	22.945.090.085	12.868.288.867
Sub Total	52.016.600.556	29.071.510.471
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-lain	-	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	52.016.600.556	29.071.510.471

6. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN									
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN									
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (UNAUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)									
NO	URAIAN	DIKA (31 DESEMBER 2024)			DIKA (31 DESEMBER 2023)			REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH)	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH)		
1	2								
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
	PENERIMAAN PERPAJAKAN								
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	90.706.868.000	91.818.661.799	1.111.793.799	83.803.915.000	81.251.461.618	900.769.066	96,95	
	PENERIMAAN HIBAH								
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	90.706.868.000	91.818.661.799	1.111.793.799	83.803.915.000	81.251.461.618	900.769.066	96,95	
B	BELANJA								
	BELANJA PEGAWAI	17.322.568.000	17.105.303.256	(217.264.744)	13.160.015.000	13.142.616.098	982.166	99,87	
	BELANJA BARANG	386.063.077.000	321.455.424.373	(64.607.652.627)	296.624.961.000	295.263.453.899	541.218.839	99,54	
	BELANJA MODAL	39.750.249.000	37.650.283.640	(2.099.965.360)	79.350.721.000	77.001.872.370	2.341.932.748	97,04	
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG								
	BELANJA SUBSIDI								
	BELANJA HIBAH								
	BELANJA BANTUAN SOSIAL								
	BELANJA LAIN-LAIN								
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	443.135.894.000	376.211.011.269	(66.924.882.731)	389.135.697.000	385.407.942.367	2.884.133.753	99,04	

7. INFORMASI TAMBAHAN

Penetapan Satker BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta praktek bisnis yang sehat, pada tahun anggaran 2019 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mendapat persetujuan untuk mengelola 2 (dua) satker biasa menjadi satker BLU melalui Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 938/KMK.05/2019 tanggal 26 Desember 2009 dan Balai Pengujian Perkeretaapian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 392/KMK.05/2023 tanggal 23 September 2023.

Sampai dengan 31 Desember 2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memiliki 2 Satker BLU.

↓Direktur Jenderal Perkeretaapian↓

Ir. Mohamad Risal Wasal, ATD., M.M., IPU.
NIP 196706081990031005

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
 ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 08

Tgl Data : 14/05/25 8:05 PM
 Tgl Cetak : 15/05/25 9:24 AM
 Halaman : 1
 lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,266,772,104,000	1,167,640,051,960	(99,132,052,040)	92.17	1,197,097,575,000	763,557,484,738	(433,540,090,262)	63.78
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	90,706,868,000	90,756,273,178	49,405,178	100.05	83,803,915,000	79,667,327,609	(4,136,587,391)	95.06
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,176,065,236,000	1,076,883,778,782	(99,181,457,218)	91.57	1,113,293,660,000	683,890,157,129	(429,403,502,871)	61.43
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,266,772,104,000	1,167,640,051,960	(99,132,052,040)	92.17	1,197,097,575,000	763,557,484,738	(433,540,090,262)	63.78
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	10,752,311,067,000	5,858,915,997,838	(4,893,395,069,162)	54.49	7,773,904,929,000	6,546,091,282,828	(1,227,813,646,172)	84.21
1. Belanja Pegawai	189,147,790,000	186,188,948,422	(2,958,841,578)	98.44	142,066,902,000	141,936,482,873	(130,419,127)	99.91
2. Belanja Barang	2,880,697,829,000	2,394,880,557,984	(485,817,271,016)	83.14	1,783,968,349,000	1,718,719,325,260	(65,249,023,740)	96.34
3. Belanja Modal	7,682,465,448,000	3,277,846,491,432	(4,404,618,956,568)	42.67	5,847,869,678,000	4,685,435,474,695	(1,162,434,203,305)	80.12
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 08

Tgl Data : 14/05/25 8:05 PM
Tgl Cetak : 15/05/25 9:24 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	10,752,311,067,000	5,858,915,997,838	(4,893,395,069,162)	54.49	7,773,904,929,000	6,546,091,282,828	(1,227,813,646,172)	84.21
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

✓ Direktur Jenderal Perkeretaapian

Ir. Mohamad Risal Wasal, ATD., M.M.,IPU.
NIP 196706081990031005

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (08) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM
Tgl Cetak : 15/05/25 9:24 AM
Halaman : 1

lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	269,489,257	0	269,489,257	0.00
Kas pada Badan Layanan Umum	47,016,600,556	29,071,510,471	17,945,090,085	61.73
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1,435,560,146,488	0	1,435,560,146,488	0.00
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	3,513,874,700	1,155,710,000	2,358,164,700	204.04
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(17,569,373)	(5,778,550)	(11,790,823)	204.04
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	3,496,305,327	1,149,931,450	2,346,373,877	204.04
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	352,000	0	352,000	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(1,760)	0	(1,760)	0.00
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	350,240	0	350,240	0.00
Persediaan	1,195,735,690,111	1,299,928,012,779	(104,192,322,668)	(8.02)
JUMLAH ASET LANCAR	2,687,078,581,979	1,330,149,454,700	1,356,929,127,279	102.01
ASET TETAP				
Tanah	160,027,501,641,173	159,612,180,557,294	415,321,083,879	0.26
Peralatan dan Mesin	6,442,210,614,393	6,180,140,026,776	262,070,587,617	4.24
Gedung dan Bangunan	6,764,052,517,282	5,886,854,605,174	877,197,912,108	14.90
Jalan, Irigasi dan Jaringan	116,890,964,472,364	110,898,545,587,633	5,992,418,884,731	5.40
Aset Tetap Lainnya	547,630,360,492	547,630,360,492	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	14,556,019,661,925	18,906,539,058,274	(4,350,519,396,349)	(23.01)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(78,846,942,198,451)	(72,020,801,422,792)	(6,826,140,775,659)	9.48
Aset Konsesi Jasa	116,616,230,616,249	116,941,150,373,911	(324,919,757,662)	(0.28)
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	(3,875,588,387,441)	(1,357,003,087,511)	(2,518,585,299,930)	185.60
JUMLAH ASET TETAP	339,122,079,297,986	345,595,236,059,251	(6,473,156,761,265)	(1.87)
Properti Investasi				
Properti Investasi	1,422,000,778,000	1,422,000,778,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(7,394,695,434)	(6,162,246,194)	(1,232,449,240)	20.00
JUMLAH Properti Investasi	1,414,606,082,566	1,415,838,531,806	(1,232,449,240)	(0.09)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	153,009,331,664	121,504,862,690	31,504,468,974	25.93
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	355,433,740,723	313,274,774,870	42,158,965,853	13.46
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	1,089,108,174,466	331,219,245,833	757,888,928,633	228.82
Aset Lain-lain	7,716,570,806	8,449,377,233	(732,806,427)	(8.67)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(12,871,113,212)	(13,222,360,002)	351,246,790	(2.66)
JUMLAH ASET LAINNYA	1,592,396,704,447	761,225,900,624	831,170,803,823	109.19
JUMLAH ASET	344,816,160,666,978	349,102,449,946,381	(4,286,289,279,403)	(1.23)

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

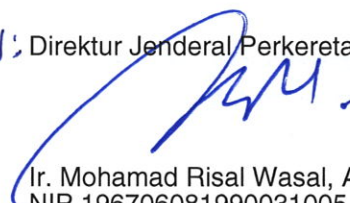


KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (08) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM
Tgl Cetak : 15/05/25 9:24 AM
Halaman : 2
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	944,802,855,444	307,782,255,832	637,020,599,612	206.97
Hibah Yang Belum Disahkan	0	12,038,106,388	(12,038,106,388)	(100.00)
Pendapatan Diterima Dimuka	190,249,151	1,257,017,775	(1,066,768,624)	(84.87)
Utang Jangka Pendek Lainnya	269,489,257	0	269,489,257	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	945,262,593,852	321,077,379,995	624,185,213,857	194.40
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	2,687,370,134,451	0	2,687,370,134,451	0.00
Kewajiban Konsesi Jasa	111,088,502,366,120	113,992,681,926,095	(2,904,179,559,975)	(2.55)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	113,775,872,500,571	113,992,681,926,095	(216,809,425,524)	(0.19)
JUMLAH KEWAJIBAN	114,721,135,094,423	114,313,759,306,090	407,375,788,333	0.36
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	230,095,025,572,555	234,788,690,640,291	(4,693,665,067,736)	(2.00)
JUMLAH EKUITAS	230,095,025,572,555	234,788,690,640,291	(4,693,665,067,736)	(2.00)
JUMLAH EKUITAS	230,095,025,572,555	234,788,690,640,291	(4,693,665,067,736)	(2.00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	344,816,160,666,978	349,102,449,946,381	(4,286,289,279,403)	(1.23)

Keterangan :
FINAL

√ Direktur Jenderal Perkeretaapian

Ir. Mohamad Risal Wasal, ATD., M.M., IPU.
NIP 196706081990031005

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ESELON I

: (08) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 15/05/25 9:24 AM

Halaman : 1

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,569,880,904,160	180,666,585,667	1,389,214,318,493	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	94,242,169,104	0	94,242,169,104	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,664,123,073,264	180,666,585,667	1,483,456,487,597	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	1,664,123,073,264	180,666,585,667	1,483,456,487,597	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	184,186,522,984	138,903,669,345	45,282,853,639	-
Beban Persediaan	15,591,563,446	19,924,826,438	(4,333,262,992)	-
Beban Barang dan Jasa	822,188,647,996	916,798,345,311	(94,609,697,315)	-
Beban Pemeliharaan	1,368,488,211,286	612,280,833,816	756,207,377,470	-
Beban Perjalanan Dinas	153,505,402,413	152,692,679,748	812,722,665	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ESELON I

: (08) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 15/05/25 9:24 AM

Halaman : 2

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8,295,739,805,003	9,257,700,256,563	(961,960,451,560)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	17,571,133	5,778,550	11,792,583	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	10,839,717,724,261	11,098,306,389,771	(258,588,665,510)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,175,594,650,997)	(10,917,639,804,104)	1,742,045,153,107	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(7,074,634,663)	33,876,224,011	(40,950,858,674)	-
Pendapatan Pelepasan Aset	1,429,268,556	35,170,977,127	(33,741,708,571)	-
Beban Pelepasan Aset	8,503,903,219	1,294,753,116	7,209,150,103	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,303,489,166,933	932,443,885,325	1,371,045,281,608	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,303,669,223,153	933,249,673,699	1,370,419,549,454	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	180,056,220	805,788,374	(625,732,154)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,296,414,532,270	966,320,109,336	1,330,094,422,934	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,879,180,118,727)	(9,951,319,694,768)	3,072,139,576,041	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6,879,180,118,727)	(9,951,319,694,768)	3,072,139,576,041	-

Keterangan :

FINAL

J. Direktur Jenderal Perkeretaapian

 Ir. Mohamad Risal Wasal, ATD., M.M., IPU.
 NIP 196706081990031005

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI

: (08) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 15/05/25 9:24 AM

Halaman : 1

lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	234,788,690,640,291	238,747,955,814,382	(3,959,265,174,091)	(1.66)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,879,180,118,727)	(9,951,319,694,768)	3,072,139,576,041	(30.87)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(2,567,829,215,601)	196,896,222,720	(2,764,725,438,321)	(1,404.15)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(457,008,883)	0	(457,008,883)	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	14,574,383,458	4,996,134,704	9,578,248,754	191.71
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,053,396,259,507)	166,435,404,030	(1,219,831,663,537)	(732.92)
LAIN-LAIN	(1,528,550,330,669)	25,464,683,986	(1,554,015,014,655)	(6,102.63)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,753,344,266,592	5,795,158,297,957	(1,041,814,031,365)	(17.98)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(4,693,665,067,736)	(3,959,265,174,091)	(734,399,893,645)	18.55
EKUITAS AKHIR	230,095,025,572,555	234,788,690,640,291	(4,693,665,067,736)	(2)

Keterangan :

FINAL

✓, Direktur Jenderal Perkeretaapian

Ir. Mohamad Risal Wasal, ATD., M.M.,IPU.
NIP 196706081990031005